

**PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP  
TINDAKAN PAJAK AGRESIF DENGAN KOMITE AUDIT,  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN DEWAN  
KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING**

**Oleh**

**Bayu Seno Pitoyo**

**5516220006**

**TESIS**



**MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS PANCASILA**

**JAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doctor), baik di Universitas Pancasila maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan pihak lain, kecuali secara tertulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, Juni

2018

Penulis

Bayu Seno Pitoyo

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perjalanan sejauh apapun jauhnya diawali dengan sebuah langkah, semua dapat ditempuh dengan mengikuti semua proses dengan benar, takterkecuali dengan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas barokah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses akademik program S2 dan melengkapi persyaratan akhir berupa tesis.

Dalam penyusunan tesis ini penulis tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. S, selaku Rektor Universitas Pancasila.
2. Bapak Prof. Dr. Soetjipto, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasila.
3. Ibu Dr. Sri Widyastuti, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.
4. Bapak Dr. JMV. Mulyadi, S.E., M.M., selaku ketua program Magister Akuntansi Universitas Pancasila.
5. Ibu Dr. Nurmala Ahmar, S.E.,Ak.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersabar dan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan hingga selesainya tesis ini.

6. Bapak Dr. Suyanto, S.E., MM., M.Ak., Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersabar dan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan hingga selesainya tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan staff pengajar pada program Magister Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Orang tuaku tercinta, Bapak Prawitosari, S.Sos., M.Si., dan Ibu Roni Sulastri. Saudaraku Dyah Widowati Amd., Keb., dan Danang Pramono Aji. Yang selalu memberikan semangat kepadaku.
9. Okky Wahyu Amanda, S.E., yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan Allah SWT membalas budi baik yang telah diberikan.

Penulis menyadari masih belum sempurna penulisan tesis ini dan banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan dari seluruh pihak yang maupun pembaca yang budiman.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan dan juga untuk penelitian selanjutnya apabila ada kekurangan mohon disempurnakan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, Juni

2018

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini menguji Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen diproposisikan sebagai variabel pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.

Data sampel penelitian ini sebanyak 96 perusahaan dalam kurung waktu 2012-2017 yang diperoleh dari JII (*Jakarta Islamic Index*). Statistic deskriptif dianalisis dengan menggunakan program WrapPLS 0.6. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan program WrapPLS 0.6.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Manajemen Laba berpengaruh terhadap Tindakan Pajak Agresif. Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif. Dewan Komisaris Independen dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif. Komite Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

Kata Kunci: Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Tindakan Pajak Agresif.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank et al.2009). Agresifitas pajak dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berasal dari pajak. Namun, di sisi lain perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima (Sabrina dan Soepriyanto, 2013).

Fenomena yang terjadi pada saat ini yakni perusahaan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII) terbukti melakukan agresifitas pajak yang cukup tinggi terbukti pada data perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, yang dihitung dengan menggunakan rumus CETR, pada tabel 1.1 adalah sebagai berikut:

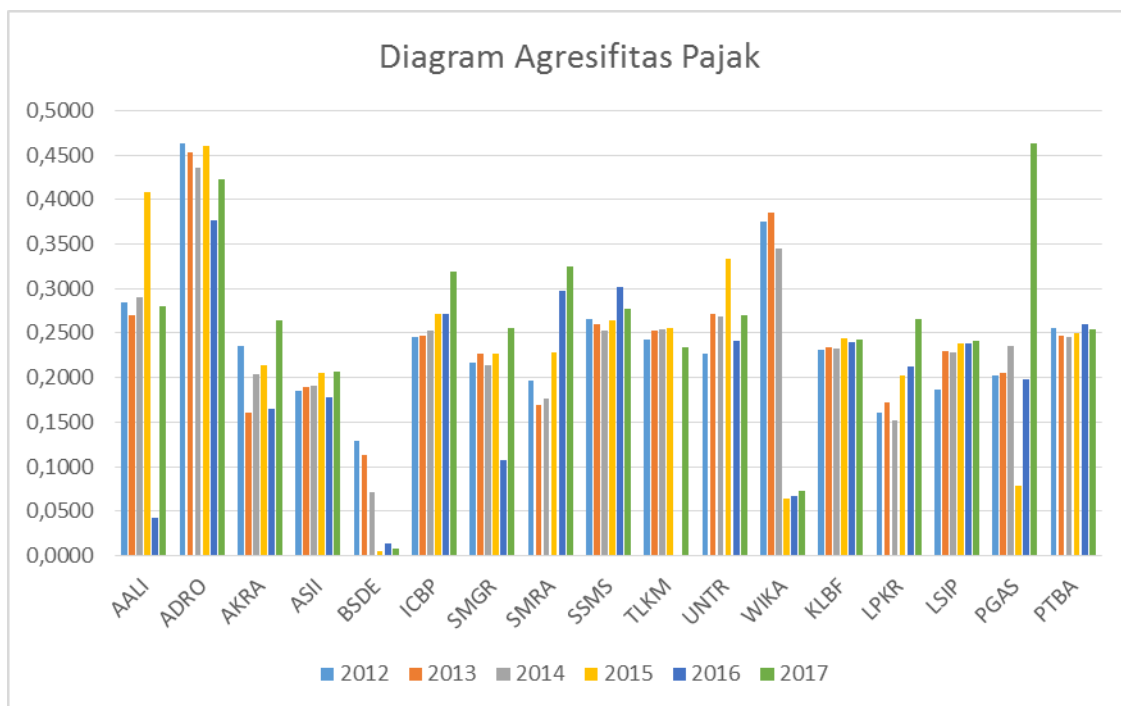
Tabel 1.1  
(Perusahaan Yang Terdaftar Pada *Jakarta Islamic Index* Periode 2012-2017)

No	Perusahaan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	AALI	0,2850	0,2695	0,2896	0,4082	0,0428	0,28071
2	ADRO	0,4629	0,4532	0,4359	0,4607	0,3766	0,42289
3	AKRA	0,2357	0,1602	0,2041	0,2140	0,1646	0,26474
4	ASII	0,1848	0,1899	0,1911	0,2046	0,1775	0,206569
5	BSDE	0,1283	0,1138	0,0720	0,0045	0,0135	0,007526
6	ICBP	0,2460	0,2473	0,2529	0,2710	0,2722	0,319479
7	SMGR	0,2164	0,2263	0,2140	0,2265	0,1081	0,256147
8	SMRA	0,1970	0,1694	0,1761	0,2287	0,2979	0,324286
9	TLKM	0,2421	0,2526	0,2549	0,2560	0,2361	0,233433
10	UNTR	0,2274	0,2715	0,2691	0,3340	0,2415	0,270781
11	WIKA	0,3748	0,3859	0,3448	0,0643	0,0677	0,072673
12	KLBF	0,2309	0,2340	0,2325	0,2437	0,2395	0,243101
13	LPKR	0,1612	0,1727	0,1515	0,2029	0,2121	0,265733
14	LSIP	0,1870	0,2291	0,2290	0,2384	0,2386	0,241308
15	PGAS	0,2030	0,2055	0,2361	0,0791	0,1985	0,463676
16	PTBA	0,2562	0,2466	0,2451	0,2506	0,2595	0,254751
<b>Rata-rata</b>		<b>0,2415</b>	<b>0,2404</b>	<b>0,2383</b>	<b>0,2325</b>	<b>0,1890</b>	<b>0,25910</b>

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan data diatas terlihat secara keseluruhan terindikasi adanya tindakan agresifitas pajak perusahaan di JII pada tahun 2012-2017. Hal ini sangatlah menarik, dikarenakan perusahaan yang berbasis *syari'ah* terbukti melakukan tindakan agresifitas pajak. Tindakan agresifitas pajak dalam bentuk grafik sebagai berikut:

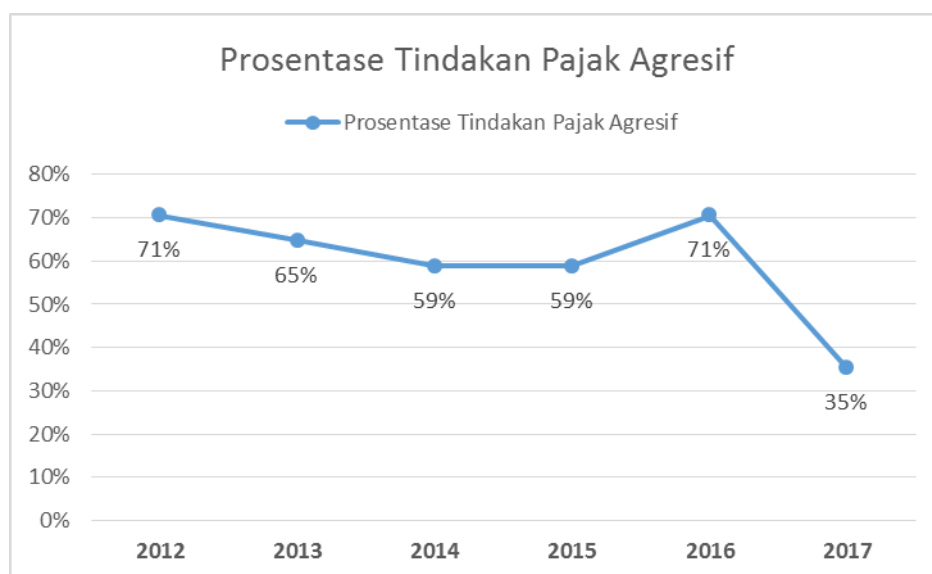
Tabel 1.2  
**Tingkat Tindakan Agresifitas Pajak Dalam Grafik**



Sumber : Data diolah, 2018

**Tabel 1.3**

**Pertumbuhan Tindakan Agresifitas Pajak**



Sumber : Data diolah, 2018

Grafik diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan tindakan pajak agresif dari tahun 2012 yaitu sebesar 71% diukur dengan membagi jumlah 12 perusahaan yang terindikasi nilai CETR kurang dari 25% dengan sampel 17 perusahaan, pada tahun 2013 yaitu sebesar 65% diukur dengan membagi jumlah 11 perusahaan yang terindikasi nilai



CETR kurang dari 25% dengan sampel 17 perusahaan, pada tahun 2014 yaitu sebesar 59% diukur dengan membagi jumlah 10 perusahaan yang terindikasi nilai CETR kurang dari 25% dengan sampel 17 perusahaan, pada tahun 2015 yaitu sebesar 59% diukur dengan membagi jumlah 10 perusahaan yang terindikasi nilai CETR kurang dari 25% dengan sampel 17 perusahaan, pada tahun 2016 yaitu sebesar 71% diukur dengan membagi jumlah 12 perusahaan yang terindikasi nilai CETR kurang dari 25% dengan sampel 17 perusahaan, sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 35% diukur dengan membagi jumlah 6 perusahaan yang terindikasi nilai CETR kurang dari 25% dengan sampel 17 perusahaan, yang tergabung dalam perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*).

Grafik diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan tindakan pajak agresif dari tahun 2012 yaitu sebesar 71% sampai dengan tahun 2014 sebesar 59%, akan tetapi terjadinya peningkatan tindakan pajak agresif pada tahun 2016 sebesar 71%, dan mengalami penurunan sehingga menunjukkan angka 35% pada tahun 2017, dalam perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*).

Dalam rentang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 10%, walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017, pada tahun ini pemerintah pusat memberikan kebijakan reformasi pajak yaitu *Tax Amnesty* namun mengalami peningkatan tindakan pajak agresif, hal ini sesuai dengan keinginan *principal* yang menginginkan laba tinggi dengan menekan biaya.

Tindakan Pajak Agresif juga dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*) (Sari dan Martani, 2010). Untuk mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen,

maka Penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan (*Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2014) dalam (Pamungkas, 2014).

Menurut Chen, *et.al* (2010), setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif, baik keuntungan yang didapat pemilik atau pemegang saham maupun manajer. Keuntungan pertama adalah adanya penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar. Kedua, adanya bonus atau kompensasi yang mungkin diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer atas tindakan pajak agresif yang telah dilakukannya dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik atau pemegang saham. Ketiga, adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extration*. *Rent extration* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Penyusunan laporan keuangan secara agresif dapat dilakukan salah satunya melalui manajemen laba. Menurut Scott (2009) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Scott (2000) juga menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Manajemen laba pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak menurut Suryanto dan Supramono

(2012) dengan manajemen laba perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Suryanto (2012) menyatakan bahwa pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak mempunyai koefisien positif (0,015) sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief (2016), Sari (2016), serta Tiaras dan Heryanto (2015) yang menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril, dkk (2015), Putri (2014), dan Cahyani (2016) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

Tugas komite audit diantaranya adalah menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha menilai sistem penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci memantau dan mengatasi konflik kepentingan dan memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan. (Warsono dkk, 2010)

Amanda (2015) menyatakan bahwa komite audit memiliki koefisiensi positif sebesar (0,029) dan signifikansi sebesar (0,046) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresifitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2014), Sabrina dan Soepriyanto (2012). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan Winarsih, dkk (2011) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresifitas pajak.

Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. (Fadhilah, 2014)

Amanda (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki koefisiensi positif sebesar (0,080) dan signifikansi sebesar (0,008) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresifitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Sabrina dan Soepriyanto (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresifitas pajak.

Kehadiran komisaris independen juga diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Fama & Jensen (1983) dalam Wulandari (2005), semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap akan

lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak.

Meilinda (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki tingkat signifikansi sebesar (0,049) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Tiaras (2015), Sabrina dan Soepriyanto (2012) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reysky *et al.* (2016). Perbedaan dengan Reysky *et al.* (2016), adalah objek penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*). Sementara objek pada penelitian Reysky *et al.* (2016), menggunakan perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. Kedua, variabel independen yaitu manajemen laba pada penelitian ini diperkuat atau diperlemah menggunakan variabel moderating yang meliputi komite audit, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen, sedangkan penelitian Reysky *et al.* (2016), variabel independen yaitu manajemen laba tidak menggunakan variabel moderating untuk memperkuat atau memperlemah.

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak, dilakukan oleh Reysky *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Henryanto (2015), dan Kamila (2014). Namun hal ini berbeda pendapat dengan hasil penelitian Amril, Dwi dan

Popi (2013) dan Putri (2014) yang menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti kembali apakah pada perusahaan yang tergabung di JII periode 2014-2017 terdapat perbedaan pengaruh terhadap tindakan pajak agresif berdasarkan manajemen laba yang meliputi komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderating. Dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mencoba mengangkatnya dengan menjadikan tulisan dalam tesis dengan judul :

**“Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta islamic index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dari tahun ke tahun bergerak secara fluktuatif.
2. Manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta islamic index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan nilai *Discretionary accrual* dari tahun ke tahun bergerak secara fluktuatif.
3. Komite audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta islamic index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan jumlah komite audit dalam perusahaan.

4. Kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan presentase rasio kepemilikan institusional perusahaan.
5. Dewan komisaris independen pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris perusahaan.
6. Kualitas Audit pada perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan kategori KAP *Big Four* dan *nonBig Four*.
7. Ukuran Perusahaan pada perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan logaritma natural (total asset).
8. *Leverage* pada perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan besarnya prosentase asset yang diperoleh dari hutang perusahaan.
9. Likuiditas pada perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
10. *Good Corporate Governance (GCG)* pada perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2012 – 2017, yang diproksikan ukuran pemeringkatan yang diterbitkan oleh IICG (*Indonesian Institute For Corporate Governance*) dengan skala.

### **1.3 Batasan Masalah**

Ruang lingkup pembahasan mengenai pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan

komite audit sebagai variabel moderating sangat luas, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Indikator pengukuran tindakan pajak agresif adalah nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
2. Indikator pengukuran manajemen laba adalah nilai *Discretionary accrual*.
3. Indikator pengukuran kepemilikan institusional adalah presentase rasio kepemilikan institusional perusahaan.
4. Indikator pengukuran dewan komisaris independen adalah membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris perusahaan.
5. Indikator pengukuran komite audit adalah diukur dengan jumlah komite audit dalam perusahaan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Memerhatikan permasalahan seperti di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh positif signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif?
2. Apakah Manajemen Laba berpengaruh positif signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif dimoderasi oleh Komite Audit?
3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh positif signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional?
4. Apakah Manajemen Laba berpengaruh positif signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif dimoderasi oleh Dewan komisaris?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**



Secara eksplisit penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dimoderasi oleh Komite Audit.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dimoderasi oleh Dewan komisaris.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan tindakan pajak agresif. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, mengenai seberapa besar pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif perusahaan dimoderasi oleh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas

Audit yang diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan serta informasi untuk perusahaan dalam mengontrol Pajak Agresif Perusahaan.

b. Bagi Investor

Untuk memberikan informasi, sehingga dapat melihat seberapa besar pengaruh yang disebabkan oleh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif perusahaan dimoderasi oleh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan

fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menciptakan *agency problem* apabila seorang *agent* (manajer) mengejar tujuan yang bertentangan dengan tujuan *principal* (pemegang saham). *Principal* membangun dan menggunakan *governance mechanism* untuk mengendalikan masalah ini. *Agency costs* adalah total dari biaya insentif, biaya *monitoring*, *enforcement costs*, dan kerugian finansial individu yang terjadi oleh *principal* (pemegang saham) karena tidak mungkin menggunakan *governance mechanism* untuk menjamin *total compliance* oleh *agent* (manajer). (Tunggal, 2014: 10-11)

Masalah agensi tidak hanya dapat terjadi antara prinsipal dengan manajemen, namun juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas (pengendali) dengan pemegang saham minoritas.

Jika ada kepemilikan minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas (kepemilikan keluarga) dengan pemilik saham minoritas (Arifin, 2003) dalam (Sari dan Martani, 2010).

Hubungan antara *Theory Agency* dengan Tindakan Pajak Agresif terletak pada konflik kepentingan yang timbul antara manajer (*agent*) yang berkeinginan untuk memaksimalkan laba (menurunkan laba kena pajak perusahaan) dengan pemilik (*principal*) yang takut nama baik perusahaan menjadi buruk akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer diketahui oleh *stakeholder* (Sabrina dan Soepriyanto, 2013).

## 2.2 Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, pajak memiliki ciri-ciri:

- a. Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan;
- b. Tidak mendapatkan kontra-prestasi langsung;
- c. Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, bisa dilihat bahwa pajak memang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, pajak harus dibayar oleh semua orang. Dan itu pula sebabnya pembayar pajak disebut dengan Wajib Pajak, artinya pihak yang harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu: (1) Fungsi *Budgetair*: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (2) Fungsi *Regulerend* :Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2011 : 1)

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri inti the Natura and Causes of the wealth of nations* yang telah diterjemahkan oleh Waluyo dan Wirawan dalam buku *Perpajakan Indonesia* (2000 : 5), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. *Equity* (Keadilan)  
Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty* (Kepastian)  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience* (Kemudahan)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak.

4. *Economy* (Ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 3), teori-teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul masing-masing orang dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Dalam proses pemungutan pajak, secara rinci Mardiasmo (2011: 7), mengemukakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b. Wajib Pajak bersifat pasif
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*  
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
 Ciri-cirinya :
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
  - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*  
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  
 Ciri-cirinya:  
 Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.3 Tindakan Pajak Agresif

Tindakan Pajak Agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga berkurangnya penerimaan kas negara. (Frank *et al.*, 2009)

Agresivitas pajak terletak di agregasi lebih rendah dalam penghindaran pajak. Hal ini mengacu pada ruang lingkup yang lebih dibatasi oleh tindakan penghindaran pajak yang sangat "agresif". Umumnya semakin lemah dukungan hukum posisi pajak perusahaan, semakin mungkin perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. (Lietz, 2013).

Suatu agresivitas pelaporan pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku). (Hite dan McGill, 1992) dan (Murphy, 2004) dalam (Sari dan Martani, 2010)

Agresivitas pajak sebagai manajemen ke bawah dari perencanaan pajak merupakan bagian penting dari pekerjaan seorang manajer, karena pajak merupakan biaya yang signifikan untuk perusahaan dan pemegang saham. (Frank, Lynch, dan Rego, 2009)

### **2.3.1 Keuntungan dan Kerugian Tindakan Pajak Agresif**

Saat memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak yang agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian tindakan yang dilakukannya. Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif yang akan dipaparkan *Chen et al* (2010) dalam Sari dan Martani (2010)

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Keuntungan (baik langsung atau tidak langsung) bagi manajer yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan berupa kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif antara lain adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan. Kemungkinan harga saham mengalami penurunan, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006) dalam (Sari dan Martani, 2010).

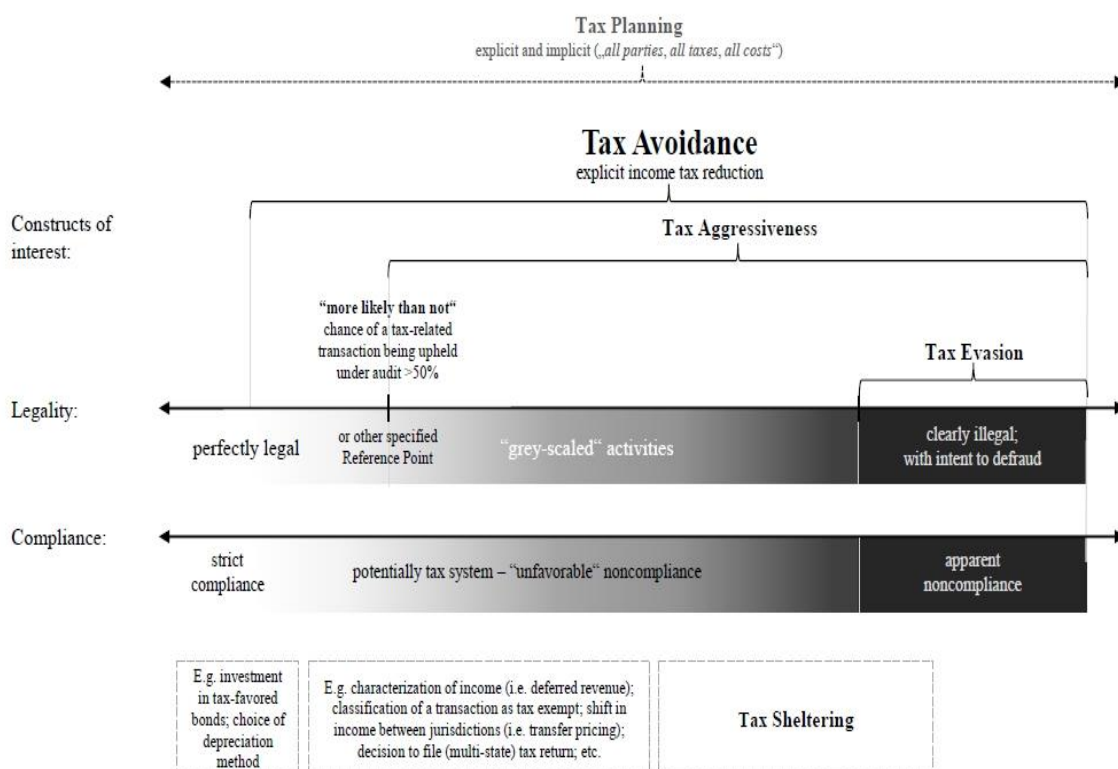
### **2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Tindakan Pajak Agresif**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perusahaan melakukan Tindakan Pajak Agresif adalah : (a) Keinginan Perusahaan dalam mengurangi Beban Pajak Eksplisit Perusahaan. (b) Celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. (c)

Karakter manager (d) Tingkat Resiko Pajak. (Choi, 2011) dalam (Pamungkas, 2014)

### 2.3.3 Perbedaan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Tindakan Pajak Agresif (*Tax Aggressive*), Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Lietz (2013) membuat suatu kerangka pemikiran yang membedakan antara Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pajak Agresif (*Tax Aggressive*), dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) yang dinamakan sebagai : “*Unifying Conceptual Framework of Corporate Tax Planning*”.



**Gambar 2.1.** *Unifying Conceptual Framework of Corporate Tax Planning* (Lietz, 2013)

Dalam kerangka pemikiran Lietz (2013) diatas membedakan secara jelas perbedaan antara Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pajak Agresif (*Tax Aggressive*), dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Dalam skala abu-abu,



dimensi perencanaan pajak berkisar dari legalitas sempurna hukum sampai dengan ilegal.

Lietz (2013) menjelaskan perbedaannya sebagai berikut:

a. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Konsep yang mendasari yang semua konstruksi pajak lainnya dalam *Unifying Conceptual Framework of Corporate Tax Planning* adalah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) perusahaan (lihat gambar 2.1). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang efektif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan yang ditujukan untuk memaksimalkan kembali setelah pajak, antara lain :

- 1) Mempertimbangkan Posisi Pajak Semua Pihak yang terlibat (Pendekatan Multilateral)
- 2) Mempertimbangkan Semua Pajak, Baik Eksplisit Dan Implisit
- 3) Mengetahui Relevansi Semua Biaya, Baik biaya Pajak Dan Non-Pajak

Dari mempertimbangkan tiga tema umum "semua pihak", "semua pajak", dan "semua biaya" maka bahwa strategi minimisasi pajak tidak selalu diinginkan. Perencanaan pajak selalu membutuhkan pertimbangan dan *trade-off* yang tidak terpisahkan dari semua pajak eksplisit dan implisit serta biaya non-pajak. Pada poin ini, konstruksi yang berada dibawah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pajak Agresif (*Tax Aggressive*), dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) berbeda (lihat gambar 2.1). namun semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak eksplisit perusahaan.

b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dalam kerangka disini didefinisikan sebagai pengurang pajak eksplisit suatu perusahaan dengan cara apapun. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang secara eksplisit dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, dan atau manfaat pajak yang diharapkan dari proses lobi. Ini menjelaskan bahwa Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) mungkin termasuk Pajak Agresif (*Tax Aggressive*), bahkan berpotensi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) eksplisit.

c. Pajak Agresif

Pajak Agresif (*Tax Aggressive*) dipahami untuk berada pada tingkat agregasi yang lebih rendah dibanding Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Kerangka konseptual yang diuraikan secara umum menunjukkan bahwa semakin lemah dukungan hukum dari posisi pajak perusahaan, akan lebih masuk akal untuk mempertimbangkan posisi ini menjadi pajak agresif (*Tax Aggressive*). Tantangan besar terletak pada upaya untuk menentukan secara obyektif titik *cut-off* di mana tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang mendasarinya ke tingkat kritis secara hukum dapat dicoba dalam rangka untuk membangun keuntungan yang lebih tepat pada label Pajak Agresif (*Tax Aggressive*). Oleh karena itu, secara tegas mengakui bahwa titik *cut-off* ini umumnya kasat mata. Perusahaan yang struktur posisi pajak mereka dengan cara yang hipotetis menanggung risiko > 50 % tidak akan dilanjutkan pada pemeriksaan potensial oleh IRS (*Internal Revenue Service*) atau lembaga lain, namun tindakan ini dianggap sebagai pajak "agresif".

d. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Sebuah hal mendasar dari Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah melawan hukum yang jelas. Namun, berbeda dengan Pajak Agresif (*Tax Aggressive*) ilegal, Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) lebih memerlukan tindakan jelas yang berusaha untuk melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau disengaja untuk kecurangan.

## 2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba dapat didefinisi sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi” (Schipper, 1989) dalam Subramanyam (2010,131). Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah , yaitu laba.

Dalam pengertian lain *Earnings Management* atau Manajemen Laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggungjawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang (Sulistyanto, 2008) dalam (Elfira, 2014).

Scott (2009) dalam Amril, dkk (2013) mendefenisikan manajemen laba sebagai tindakan manajer memilih kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi pendapatan dalam pelaporan keuangan. Manajemen laba merupakan tindakan mementingkan kepentingan pribadi manajer untuk memaksimalkan utilitas dan kesejahteraannya dalam menjalankan kontrak dengan

prinsipal. Informasi perusahaan yang memadai dimiliki manajer dimanfaatkan agar tindakan manajemen laba dapat dilakukan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah usaha manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang dibebaskan, untuk mengubah kondisi laba perusahaan baik dengan menaikkan laba, menurunkan laba, ataupun meratakan laba, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun perusahaan.

#### **2.4.1. Pengukuran *Earnings Management***

##### **1. *Accrual-based Earnings Management***

Belkaoui (2007) dalam bukunya menyatakan, hal yang sangat penting untuk dapat bisa memahami manajemen laba sebagai manajemen akrual dapat dijelaskan melalui suatu hubungan sebagai berikut:

- 1) Total Akrual = Laporan Laba Bersih – Arus Kas Operasi
- 2) Total Akrual = Akrual bukan Pilihan (*nondiscretionary accrual*) + Akrual pilihan (*discretionary accrual*)

Pendekatan dalam mengestimasi nilai akrual pilihan adalah dengan meregresikan total akrual dari variabel-variabel yang merupakan wakil dari akrual normal. Akrual pilihan (*nondiscretionary accrual*) dianggap sebagai komponen yang tidak dapat dijelaskan atau merupakan residual dari total akrual. Berikut adalah model-model pengukuran untuk mengukur *accrual-based earnings management* yang dikutip dari Belkaoui (2007).

Model *discretionary accrual* pertama-tama melibatkan perhitungan dari total akrual. Untuk itu model akrual total disajikan terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan model *nondiscretionary accrual*.

a. Model total akrual

Ada dua model umum yang digunakan untuk menghitung akrual, yaitu 1) pendekatan neraca, dan 2) pendekatan arus kas.

1. Pendekatan Neraca

Untuk perhitungan akrual total dengan pendekatan neraca adalah sebagai berikut.

$$TA_t = \Delta CA_t - \Delta Cash_t - \Delta CL_t + \Delta DCL_t - DEP_t$$

Keterangan:

$Ta_t$  = Akrual Total

$\Delta CA_t$  = perubahan dalam aktiva tahun berjalan di tahun t

$\Delta cash_t$  =perubahan dalam kas dan setara kas di tahun berjalan

$\Delta CL_t$  =perubahan dalam utang tahun berjalan di tahun t

$\Delta DCL_t$  =perubahan dalam utang termasuk utang tahun berjalan di tahun t

$DEP_t$  =beban penyusutan dan amortisasi dalam tahun t

Berdasarkan temuan-temuan hasil studi yang didasarkan pada pendekatan neraca tradisional ini, terdapat kelemahan akibat kontaminasi dari perhitungan total akrual. Collins dan Hribar dalam Belkaoui (2007) menyarankan suatu pendekatan langsung yaitu dengan menggunakan pendekatan arus kas.

2. Pendekatan Arus Kas

Dalam pendekatan ini, total akrual dihitung sebagai hasil perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi yang diambil dari laporan arus kas.

$$TA_t = NI_t - CFO_t$$

Keterangan :

$Ta_t$  = Total Akrual

$Ni_t$  = Net Income (laba bersih) di tahun t

$CFO_t$  = Arus Kas Operasi perusahaan di tahun t

## b. Model Akrual Pilihan

### 1) Model De Angelo

Porsi pilihan dalam Model de Angelo adalah perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa t disimbolkan dalam aktiva total ( $A_{t-1}$ ) dan *nondiscretionary accrual* ( $NDA_t$ ). Penghitungan  $NDA_t$  bergantung pada akrual total di periode sebelumnya ( $Ta_{t-1}$ ) disimbolkan dengan aktiva total keseluruhan ( $AT_{t-2}$ ).

$$NDA_t = \frac{TA_t - 1}{A_t - 2}$$

### 2) Model Healy

Dalam model Healy  $NDA_t$  adalah nilai rata-rata dari  $Tat$  yang dilambangkan dengan aktiva total keseluruhan ( $At-1$ ) dari periode estimasi. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{1}{n} \sum \gamma \left( \frac{TA\gamma}{A\gamma - 1} \right)$$

Keterangan:

$N$  = jumlah tahun periode estimasi

$\gamma$  = lambang tahun untuk waktu ( $t - n, t - n + 1, \dots, t - 1$ ) termasuk dalam periode estimasi

Perbedaan utama antara model De Angelo dengan Healy adalah bahwa NDA mengikuti proses acak dalam model De Angelo dan suatu proses rata-rata kebalikan dalam model Healy.

### 3) Model Jones

Tujuan utama dari model Jones ini adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Nilai NDA dapat diestimasi dengan persamaan berikut.

$$NDA_t = \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE}{A_{t-1}} \right)$$

Keterangan:

$\Delta REV_t$  = pendapatan di tahun  $t$  – pendapatan di tahun  $t-1$

$PPE_t$  = aktiva tetap kotor di tahun  $t$

$AT_{t-1}$  = aktiva total di akhir tahun  $t-1$

$\alpha_1, \alpha_2,$  dan  $\alpha_3$  = parameter spesifik perusahaan (koefisien)

Estimasi dari parameter spesifik perusahaan dihasilkan dari penggunaan model berikut ini.

$$\frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

$\alpha_1, \alpha_2,$  dan  $\alpha_3$  merupakan estimasi OLS pada  $\alpha_1, \alpha_2,$  dan  $\alpha_3$ . Nilai residu  $\varepsilon_t$ ,  $\alpha_2,$  dan  $\alpha_3$  merupakan nilai DA dalam total akrual.

#### 4) Model Jones Modifikasi

Model Jones Modifikasi ditujukan untuk mengeliminasi kecenderungan asumsi dalam model Jones dalam rangka mengukur akrual pilihan dengan kesalahan pada saat pilihan dipergunakan terhadap pengakuan pendapatan. Model yang dimodifikasi ini memperhitungkan NDA selama periode peristiwa. Persamaan matematisnya dirumuskan sebagai berikut ini.

$$NDA_t = \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right)$$

$\Delta REC_t$  = piutang bersih di tahun t – piutang bersih di tahun t-1

Estimasi  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ , dan  $\alpha_3$  serta NDA diperoleh dari model Jones asli, bukan dari model yang telah dimodifikasi selama periode estimasi.

#### 5) Model industri

Pada model industri berasumsi bahwa NDA adalah konstan dari tahun ke tahun, dan variasi dalam penentuan NDA adalah umum terjadi di antara perusahaan di industri yang sama. Model industri ini digambarkan sebagai berikut.

$$NDA_t = \beta_1 + \beta_2 \text{median}; \left( \frac{TA_t}{A_{t-1}} \right)$$

Keterangan:

$NDA_t$  =dihitung dengan model Jones dan median

$TA_t / A_{t-1}$  =nilai median dari akrual total di tahun t

$\beta_1, \beta_2$  =dari regresi rata-rata biasa pada periode estimasi

#### 6) Model Kang dan Sivaramakrishnan



Model Kang dan Sivaramakrishnan bergantung pada pendekatan alternatif, dimana:

- a) Mengestimasi akrual yang dikelola dengan menggunakan tingkatan daripada perubahan dalam aktiva lancar dan utang lancar.
- b) Mencakup harga pokok penjualan dan juga beban-beban lain
- c) Tidak membutuhkan regresi menjadi tidak terkontaminasi.

Model ini digambarkan dalam persamaan sebagai berikut.

$$AB_{it} = \Phi_0 + \Phi_1(\sigma_{1i}REV_{it}) + \Phi_2(\sigma_{2i}EXP_{it}) + \Phi_3(\sigma_{3i}GPPE_{it}) + U_{it}$$

Keterangan:

$AB_{it}$  = saldo akrual

$AR_{it}$  =  $INV_{it} + OCA_{it} + CL_{it} + DEP_{it}$

$AR_{it}$  = piutang diluar pengembalian pajak

$INV_{it}$  = persediaan

$OCA_{it}$  = aktiva lancar selain kas, piutang, dan persediaan

$CL_{it}$  = utang lancar tanpa pajak dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka satu tahun

$DEP_{it}$  = depresiasi dan amortisasi

$REV_{it}$  = pendapatan dan penjualan bersih

EXP = beban operasi ( harga pokok penjualan, beban penjualan dan administrasi sebelum penyusutan)

GPPE = aktiva tetap kotor

NTA = aktiva total bersih

$$\sigma_{1i} = \frac{AR_{i,t} - 1}{REV_{i,t} - 1}$$

$$\sigma_{2i} = \frac{NV_{i,t-1} + OCA_{i,t-1} - CL_{i,t-1}}{EXP_{i,t-1}}$$

$$\sigma_{2i} = \frac{DEP_{i,t} - 1}{GPPE_{i,t-1}}$$

Parameter  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , dan  $\sigma_3$  adalah rasio perputaran yang mengakomodasi spesifikasi perusahaan dan mengompensasikan fakta bahwa persamaan adalah estimasi dari suatu kumpulan contoh.

## **2. Real Earnings Management**

Pengukuran *real earnings management* dilakukan melalui manipulasi aktivitas riil dengan menggunakan model pengukuran yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006). Proksi-proksi manajemen laba melalui pendekatan ini yaitu *abnormal CFO*, *abnormal discretionary expenses*, dan *abnormal production cost*. Penggunaan proksi-proksi tersebut untuk mengukur manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil karena beberapa penelitian menemukan bahwa para manajer mulai beralih dari manajemen laba melalui manipulasi akrual menuju manipulasi aktivitas riil. Berikut adalah perhitungan dari *abnormal CFO*, *abnormal*

*discretionary expenses*, dan *abnormal production cost* menurut Roychowdhury (2006), Zarowin dan Cohen (2008), dan Sasongko, dkk. (2012).

a) *Abnormal CFO* (Arus Kas Operasi Abnormal)

Manipulasi aktivitas riil dapat dideteksi melalui arus kas operasi menggunakan arus kas operasi abnormal (ABN\_CFO). Arus kas operasi abnormal diperoleh dari selisih nilai arus kas operasi aktual yang diskala dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan arus kas kegiatan operasi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\frac{CFO_t}{TA_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left( \frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{S_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{\Delta S_t}{TA_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Dengan  $\Delta S_t = S_t - S_{t-1}$ , keterangan:

- CFO<sub>t</sub> = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t
- TA<sub>t-1</sub> = total aset perusahaan i pada tahun t-1
- S<sub>t</sub> = penjualan total perusahaan i pada tahun t-1
- ΔS<sub>t</sub> = perubahan penjualan perusahaan dari akhir tahun dengan tahun t-1
- a<sub>0</sub>, a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> = konstanta.
- e<sub>t</sub> = *error term* pada tahun t

Jika aliran kas operasi abnormal bernilai negatif, hal tersebut mengindikasikan perusahaan tersebut melakukan manajemen laba real melalui manipulasi penjualan (Ferdawaty, 2009)

b) *Abnormal Discretionary Expenses* (Biaya Diskresioner Abnormal)

Manipulai aktivitas riil dapat dideteksi melalui biaya diskresioner menggunakan biaya diskresioner abnormal (ABN\_DISEXP). Perusahaan akan diduga melakukan *real earnings management* melalui pengurangan biaya diskresioner abnormal jika hasil dari biaya diskresionernya bernilai negatif. Biaya diskresioner abnormal diperoleh dari selisih nilai biaya diskresioner aktual yang diskala dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan biaya diskresioner normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\frac{DISEXP_t}{TA_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left( \frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{S_t}{TA_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$DISEXP_t$  = biaya diskresioner pada tahun t

$TA_{t-1}$  = total aktiva pada tahun t-1

$S_t$  = penjualan pada tahun t

$a_0, a_1, a_2$  = konstanta

$e_t$  = *error term* pada tahun t

c) *Abnormal Production Cost* (Biaya Produksi Abnormal)

Manipulai aktivitas riil dapat dideteksi melalui biaya produksi menggunakan biaya produksi abnormal (ABN\_PROD). Ferdawaty (2009) menyatakan perusahaan yang diduga melakukan *real earnings management* mempunyai nilai abnormal produksi positif. Biaya produksi abnormal diperoleh dari selisih nilai biaya

produksi aktual yang diskala dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan biaya produksi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\frac{PROD_t}{TA_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left( \frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{S_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{\Delta S_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_4 \left( \frac{\Delta S_{t-1}}{TA_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$PROD_t$  = biaya produksi pada tahun t

$TA_{t-1}$  = total aktiva pada tahun t-1

$S_t$  = penjualan pada tahun t

$\Delta S_t$  = penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1

$\Delta S_{t-1}$  = perubahan penjualan pada tahun t-1

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  = konstanta

$\varepsilon_t$  = *error term* pada tahun t

Setelah diperoleh nilai dari masing-masing proksi maka selanjutnya aliran kas operasi abnormal, biaya diskresioner abnormal, dan biaya produksi abnormal dijumlahkan untuk dapat menangkap efek secara keseluruhan dari manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Selain itu untuk menyamakan arah antar masing masing proksi maka *abnormal production cost* dikalikan dengan minus satu (-1) sebelum dijumlahkan. Penjumlahan dari ketiga proksi itulah yang akan dinyatakan sebagai nilai *real earnings management*. (Ferdawaty, 2009; Pratiwi, 2013)

$$REM = (ABN\_CFO) + (ABN\_DISEXP) + (ABN\_PROD(-1))$$

## 2.5 Komite Audit

Komite audit adalah sub panitia dari *board of directors* yang terdiri atas direktur independen dari luar. Komite audit mempunyai tanggungjawab pengawasan (atas nama *board of directors* dan pemegang saham) untuk pelaporan luar perusahaan (mencakup laporan keuangan tahunan); pemantauan risiko dan proses pengendalian; dan baik fungsi audit internal dan eksternal; komite audit tidak secara langsung menyiapkan laporan keuangan. Namun komite audit melakukan pengecekan independen atas manajemen dan sebagai penyokong untuk menggambarkan aktivitas ekonomi perusahaan. (Tunggal, 2014)

Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012

menyatakan bahwa:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit salah satunya.”

Komite Audit adalah suatu organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, serta beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. (Surya dan Yustiavandana, 2006:145) dalam (Pamungkas, 2014).

Dewan komisaris membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. (Pohan, 2008) dalam (Annisa, 2011)

Menurut Warsono dkk (2010), tugas utama Komite Audit diantaranya :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha.
2. Menilai sistem penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci.
3. Memantau dan mengatasi konflik kepentingan.
4. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

## 2.6 Kepemilikan Institusional

Pemangku kepentingan berperan dalam fungsi pemantauan (*monitoring function*). Kepemilikan saham suatu perusahaan lazimnya terdiri dari banyak individu/institusi. Pemegang saham inilah yang lazimnya dapat menentukan “merah dan putih”-nya perusahaan. (Warsono dkk, 2010)

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. (Sujoko, 2007) dalam (Fadhilah, 2014)

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agency. (Chen, 2008) dalam (Fadhilah, 2014)

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana, 2009) dalam (Fadhilah, 2014).

## **2.7 Dewan komisaris Independen**

Dewan komisaris perusahaan terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menyebutkan bahwa, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerjanya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan di Indonesia. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan kriteria tentang komisaris independen sebagai berikut :

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen perusahaan;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;

3. Komisaris Independen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam 1 kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati jabatan seperti itu;
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional bagi perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh bagi perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari hal kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000).

Sedangkan berdasarkan peraturan atau pedoman Bursa Efek Indonesia (BEI), komisaris independen memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pihak yang tidak terafiliasi pemegang saham pengendali perusahaan lain.
2. Pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajer perusahaan atau anggota direksi perusahaan lain.
3. Pihak yang bukan pemimpin di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan lainnya.
4. Pihak yang memahami peraturan atau pedoman mengenai bursa efek. Komisaris independen harus dapat melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
  2. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan monitoring dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:



- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi perusahaan tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan telah mengangkat eksekutif dan manajermanajer profesional.
- c. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik oleh perusahaan.
- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain :
  1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
  2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
  3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
  4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
  5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1- A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan:

“Rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan”.

Selain itu, kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai

dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh secara gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi transaksi atau kegiatan emiten, yang secara material mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 80 ayat 1 UU No.8/1995)

## 2.8 Kajian Literatur

Reysky Aisyah Arief (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Sabrina dan Soepriyanto (2013) juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pajak agresif sebelum dan sesudah reformasi pajak serta menganalisis karakteristik corporate governace terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian dilakukan terhadap industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pra-Reformasi Pajak (2007,2008) dan Pasca-Reformasi Pajak (2010,2011) dengan total observasi sebanyak 232 firmyears. Metode penelitian menggunakan regresi panel logistic dengan menggunakan STATA 12 dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia pasca reformasi pajak tidak melakukan tindakan pajak agresif baik dilihat secara level industri maupun perusahaan, dan karakteristik corporate governance yaitu kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan GAAP effective tax rate (GETR) dan book-tax differences (BTD), komite audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan book-tax differences (BTD), leverage berpengaruh signifikan pada pengukuran tindakan pajak agresif yaitu GAAP effective tax rate (GETR), dan profitabilitas yang berpengaruh signifikan pada ketiga pengukuran tindakan pajak agresif yaitu GAAP effective tax rate (GETR), Current effective tax rate (CuETR) dan book-tax differences

(BTD). Sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Okky Wahyu Amanda (2015) dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

Fahriani (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *good corporate governance* terhadap pajak agresif pada perusahaan manufaktur” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dan variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2013.

Irfan Tiaras dan Heryanto (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dan variabel dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2011.

Nadya Winda Sari (2016) melakukan penelitian yang berjudul “*The Influence Of Earning Management To Tax Aggressiveness*.” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2015.

Amril,dkk (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak.” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif tidak signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2011-2013.

Putri (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan .” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif tidak signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2008-2012.

Winarsih,dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif.” Dalam penelitian ini dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2009-2012.

Kamila dan Martani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak.” Dalam penelitian ini manajemen laba sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada 113 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2008-2011.

Suryanto dan Supramono (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.” Dalam penelitian ini manajemen laba sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada 39 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2006-2010.

Risma Cahyani (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.” Dalam penelitian ini manajemen laba sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada 210 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2010-2014.

Pamungkas (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Penerapan *Good Corporate Governance* dan Reputasi Auditor terhadap tindakan Pajak Agresivitas.” Dalam penelitian ini komite audit sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada 14 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2010-2012.

Sabrina dan Soepriyanto (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif.” Dalam

penelitian ini komite audit sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2007-2011.

Tang (2011) melakukan penelitian yang berjudul “*Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management ? Empirical Evidence From China.*” Dalam penelitian ini manajemen laba sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan China yang terdaftar di *Shanghai or Shenzhen* dalam kurun waktu 1999-2004.

Meilinda (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak.” Dalam penelitian ini dewan komisaris independen sebagai variabel independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan pajak agresif sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2009-2010.

**Tabel 2.1**  
**Kajian Literatur**

No	Peneliti dan Judul	Metodologi Penelitian		Hasil Penelitian
		Perbedaan	Persamaan	

1	Arief (2016) "Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak"	Sampel : 17 Perusahaan Batu bara. Tahun 2011-2014	Variabel : Manajemen Laba dan Tindakan Pajak Agresif	variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak.
2	Sabrina dan Soepriyanto (2013). "Analisis Karakteristik Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif."	Sampel : 232 perusahaan industri manufaktur. Tahun 2007-2011 Variabel : Reformasi Pajak, investor institusional, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i>	Variabel : Komisaris independen, komite audit, dan tindakan pajak agresif	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Akan tetapi Komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
3	Amanda (2015) "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif".	Sampel : Perusahaan jasa sektor keuangan. Tahun 2012-2014. Variabel : Kualitas Audit	Variabel : Kepemilikan institusional komite audit, dan tindakan pajak agresif	kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

4	Fahriani (2016) “Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur.”	Sampel : Perusahaan manufaktur. Tahun 2009-2013. Variabel : Dewan direksi dan <i>good corporate governance</i>	Variabel : Komite Audit, dewan komisaris independen, dan tindakan pajak agresif	Dewan komisaris independen sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dan variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.
5	Tiaras dan Heryanto (2011) “Pengaruh likuiditas, <i>leverage</i> , manajemen laba, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.”	Sampel : perusahaan industri manufaktur. Tahun 2010-2011. Variabel : <i>leverage</i> , likuiditas, dan ukuran perusahaan	Variabel : Manajemen Laba, dewan komisaris independen, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dan variabel dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak
6	Sari (2016) “ <i>The Influence Of Earning Management To Tax Aggressiveness.</i> ”	Sampel : perusahaan industri manufaktur subsektor makanan dan minuman. Tahun 2010-2015.	Variabel : Manajemen Laba, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak



7	Amril,dkk (2015) “Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak.”	Sampel : perusahaan industri manufaktur . Tahun 2011-2013.	Variabel : Manajemen Laba, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif tidak signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
8	Putri (2014) “Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan .”	Sampel : perusahaan industri manufaktur . Tahun 2008-2012. Variabel : likuiditas	Variabel : Manajemen Laba, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif tidak signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak.
9	Winarsih,dkk (2014) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif.”	Sampel : perusahaan industri manufaktur . Tahun 2009-2012. Variabel : ukuran dewan komisaris	Variabel : Manajemen Laba, dewan komisaris independen, komite audit dan tindakan pajak agresif	Dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

10	Kamila dan Martani (2014) “Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak.”	Sampel : 113 perusahaan manufaktur . Tahun 2008-2011.	Variabel : Manajemen Laba, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen.
11	Suryanto dan Supramono (2012) “Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.”	Sampel : 39 perusahaan manufaktur . Tahun 2006-2010. Variabel : <i>leverage</i> , dan likuiditas	Variabel : Manajemen Laba, komisaris independen dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
12	Cahyani (2016) “Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak.”	Sampel : 210 perusahaan manufaktur . Tahun 2010-2014. Variabel : <i>Corporate social responsibility</i>	Variabel : Manajemen Laba, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen.
13	Pamungkas (2014) “Pengaruh Komite Audit, Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Reputasi Auditor terhadap tindakan Pajak Agresivitas.”	Sampel : 14 perusahaan manufaktur . Tahun 2010-2012. Variabel : <i>Good corporate governance</i> , reputasi auditor, perencanaan pajak	Variabel : Komite audit, dan tindakan pajak agresif	Komite audit sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen

14	Tang (2011) “ <i>Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management ? Empirical Evidence From China.</i> ”	Sampel : perusahaan China yang terdaftar di Shanghai or Shenzhen . Tahun 1999-2004.	Variabel : Manajemen laba, dan tindakan pajak agresif	Manajemen laba sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif
15	Meilinda (2013) “Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Pajak.”	Sampel : Perusahaan manufaktur . Tahun 2009-2010. Variabel : Jumlah kompensasi, dewan komisaris	Variabel : Dewan komisaris independen dan tindakan pajak agresif	Dewan komisaris independen sebagai variabel independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan pajak agresif sebagai variabel dependen.

Tabel 2.2

### Penelitian Terdahulu Terhadap Agresifitas Pajak

PP	RA	G.C.G	JK	DK	C.S.R	C.G	UK.D	UK.P	LIK	LEV	SIZE
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	S	TS
.	.	S	.	.	.	.	.	.	S	TS	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	TS	.	.
.	.	.	.	.	.	S	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	TS	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	S-	.	.
.	.	.	.	.	.	.	TS	.	.	S	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TS	S	S	S+	S+	.	.	.	.	.	.	.

NO	Nama Peneliti	M.L	K.I	D.W.I	K.A	INST	AUDIT
1	Arief (2016)	S	-	-	-	-	-
2	Sabrina dan Soepriyanto (2012)	-	TS	TS	S	S	S
3	Amanda (2015)	-	S+	-	S+	-	S
4	Fahriani (2016)	-	-	S+	TS	-	-
5	Tiaras dan Heryanto (2015)	S	-	TS	-	-	-
6	Sari (2016)	S+	-	-	-	-	-
7	Amril,dkk (2015)	TS+	S-	S-	-	-	-
8	Putri (2014)	TS+	-	-	-	-	-
9	Winarsih, dkk (2011)	TS+	-	S	TS	-	-
10	Kamila dan Martani (2014)	S+	-	-	-	-	-
11	Suryanto dan Suparmono (2012)	S+	-	S-	-	-	-
12	Cahyani (2016)	TS	-	-	-	-	-
13	Pamungkas (2014)	-	-	-	S+	-	-
14	Tang (2011)	S+	-	-	-	-	-
15	Melinda (2013)	-	-	S-	-	-	-

Sumber : Data diolah, 2018

Keterangan:

S+ : Signifikan Positif

S- : Signifikan Negatif

TS : Tidak Signifikan

Tanda Variabel:

M.L : Manajemen Laba

K.I : Kepemilikan Institusional

D.W.I : Dewan Komisaris Independen

K.A : Komite Audit

INST : Investor Institusional

AUDIT: Kualitas Audit

SIZE : Ukuran Perusahaan

LEV : *Leverage*

LIK : Likuiditas

UK.P : Ukuran Perusahaan

UK.D : Ukuran Dewan Komisaris

C.G : *Corporate Governance*

C.S.R : *Corporate Social Responsibility*

D.K : Dewan Komisaris

J.K : Jumlah Kompensasi

G.C.G : *Good Corporate Governance*

R.A : Reputasi Auditor

P.P : Perencanaan Pajak

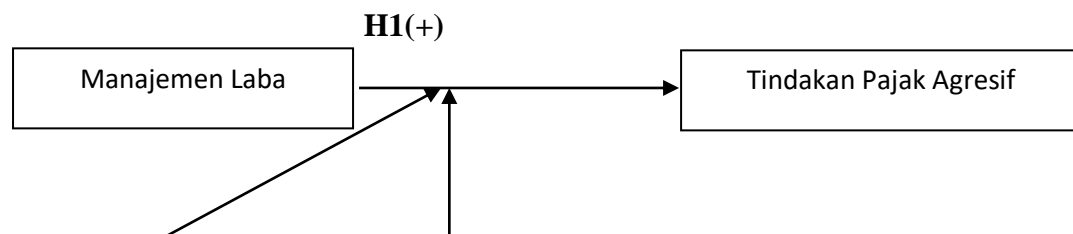
## 2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis

Secara diagramatis dari beberapa faktor yang mempengaruhi Tindakan Pajak Agresif, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari Manajemen Laba sebagai variabel predictor dengan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Jumlah Anggota Komite Audit sebagai variabel moderating.

Untuk mengetahui hal tersebut kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.3**

### **Kerangka Pemikiran**



## 2.10 Perumusan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.

Menurut Tiaras dan Heryanto (2015) manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh besarnya laba atau pendapatan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pajak menjadi salah satu masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan menurunkan laba bersih perusahaan sehingga menurut Badertscher et al (2009) dalam Suryanto dan Supramono (2012) perusahaan akan melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Perusahaan lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak. Bila perusahaan semakin besar melakukan *income decreasing* maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Menurut Arief (2016) secara parsial manajemen laba berpengaruh secara parsial terhadap agresifitas pajak, begitu juga pengujian yang dilakukan oleh Suryanto dan Supramono (2012) pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak mempunyai koefisien positif (0,015) sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2014), Tiaras dan Henryanto (2015), Sari (2016), dan Tang (2011) yang menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

**H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.**

### **2.10.2 Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.**

Pemangku kepentingan berperan dalam fungsi pemantauan (*monitoring function*). Kepemilikan saham suatu perusahaan lazimnya terdiri dari banyak individu/ institusi. Pemegang saham inilah yang lazimnya dapat menentukan “merah dan putih”-nya perusahaan. (Amanda, 2015)

Secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Fala (2007) dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu *internal mechanisms* dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dan komite audit. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain menggunakan *internal mechanism*, seperti kepemilikan institusional dan pengendalian pasar.

Dalam penelitian Amanda (2015) dan Amril, dkk (2015) kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Dikarenakan kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan, keberadaan mereka dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini diduga terjadi karena dengan memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang besar, investor institusional memiliki insentif yang kuat dalam memastikan bahwa keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Peningkatan kepemilikan institusional dapat menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Harapan dari penelitian ini adalah semakin

besar kepemilikan institusional maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

**H2 : Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.**

### **2.10.3 Dewan komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.**

Pakar dari *agency theory* adalah *David Band*. *David Band* merangkum keterkaitan antara *agency theory* dengan *corporate governance* di dalam perusahaan modern. Teori agensi yang dikemukakan oleh *David Band* memberikan wawasan analisis untuk mengkaji dampak hubungan antara agen dan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Dalam teori agensi ini juga menyatakan bahwa agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *pricipal*-nya. Agen harus mempergunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan.

Fama & Jensen (1983) dalam Amril, dkk (2015) menyatakan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Wewenang dewan komisaris untuk



mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen yang melakukan manajemen laba untuk melakukan tindakan pajak agresif. Dengan tindakan pajak agresif, diyakini akan meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian, suatu perusahaan yang baik akan menurunkan manajemen laba

yang dilakukan oleh manajer atau bahkan manajer tidak akan melakukan manajemen laba. Peranan dewan komisaris menurut Vafeas (1998) juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Sejalan dengan hal tersebut, Dwi suryanto (2012), mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan sehingga hal ini dapat memperlemah tindakan pajak agresif. Harapan dari penelitian ini adalah semakin besar dewan komisaris independen maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

**H3 : Dewan komisaris independen memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.**

#### **2.10.4 Jumlah Anggota Komite Audit Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.**

Komite audit adalah sub panitia dari *board of directors* yang terdiri atas direktur independen dari luar. Komite audit mempunyai tanggungjawab pengawasan (atas nama

*board of directors* dan pemegang saham) untuk pelaporan luar perusahaan (mencakup laporan keuangan tahunan); pemantauan risiko dan proses pengendalian; dan baik fungsi audit internal dan eksternal, komite audit tidak secara langsung menyiapkan laporan keuangan. Namun komite audit melakukan pengecekan independen atas manajemen dan sebagai penyokong untuk menggambarkan aktivitas ekonomi perusahaan. (Amanda, 2015)

Komite Audit dengan anggota lebih dari 3 orang memiliki perubahan positif terhadap tindakan pajak agresif yang berarti perusahaan cenderung agresif terhadap pajak pada saat memiliki komite audit 3 orang. (Pamungkas, 2014).

Komite audit mempunyai fungsi sebagai pembantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen untuk mengurangi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, oleh karena itu peran komite audit dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen yang melakukan manajemen laba untuk melakukan tindakan pajak agresif. Harapan dari penelitian ini adalah semakin tinggi jumlah komite audit maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

**H4 : Komite audit memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Design Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif (statistik) dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Definisi populasi menurut Sugiyono (2013) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di JII dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di JII selama periode 2014-2017 yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek penelitian adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2014-2016. Perusahaan pada JII dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan.

Sedangkan sampelnya diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian (Suharyadi dan Purwanto, 2009:17) Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2012-2017 berkaitan dengan data variabel moderasi, variabel independen, dan variabel dependen.
2. Tergabung di dalam JII dan tidak keluar (*delisting*) dari *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode penelitian tahun 2012-2017.
3. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan (memiliki data) yang lengkap.
4. Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2012-2017.
5. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Sampel Penelitian**

No	Klasifikasi Perusahaan	Jumlah
1	Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2012-2017 berkaitan dengan data variabel moderasi, variabel independen, dan variabel dependen.	30
2	Perusahaan yang keluar ( <i>delisting</i> ) dari <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) selama periode penelitian tahun 2012-2017.	(10)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2012-2017.	(4)
Jumlah Sampel		16
Tahun Pengamatan		6
Total Pengamatan		96

Sumber : Data diolah, 2018

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data dokumenter yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia yang tersedia melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data yang dikumpulkan adalah data perusahaan pada JII periode 2012-2017 yang diperoleh dalam laporan keuangan perusahaan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2011: 129). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011: 132).

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial dan digunakan untuk menelusuri data historis. (Bungin, 2011: 154).

Pengambilan data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2012-2017. Dari data yang diperoleh akan diolah dengan bantuan program Microsoft excel dan software SPSS (*Statistic Product and Service Solution*).

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.5.1 Tindakan Pajak Agresif.**

##### **a. Definisi Konseptual**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. Tindakan Pajak Agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak

melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. (Frank, *et. al.* ,2009).

#### b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu Tindakan Pajak Agresif perusahaan. Dalam mengukur variabel dependen yaitu Tindakan Pajak Agresif perusahaan, penelitian ini mengikuti kriteria dari penelitian sebelumnya yaitu Sari dan Martani (2010) dalam Amanda (2015), yaitu :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre Tax Income}_{it}}$$

Keterangan :

*Cash Tax Paid* : Pajak yang dibayarkan

*Pre Tax Income* : Laba Sebelum Pajak

### 3.5.2 Manajemen laba

#### a. Definisi Konseptual

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. (Reysky, 2016).

#### b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, manajemen laba akrual diukur dengan menggunakan *discretionary accrual*. Dalam menghitung *discretionary accrual* digunakan *Modified Jones Model*. Menurut Tiaras & Henryanto (2015).

Model perhitungannya adalah manajemen laba diukur melalui *discretionary accruals* yang dihitung dengan cara menselisihkan total akrual dengan non *discretionary*

*accruals*. Model ini menggunakan Total *Accruals* (TA) yang diklasifikasikan menjadi *Discretionary Accruals* (DA) dan *Non Discretionary Accruals* (NDA).

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$$TAC_{it} / TA_{it-1} = \alpha_1 (1 / TA_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REC_{it} / TA_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / TA_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it} / TA_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / TA_{it-1})$$

$$DA_{it} = (TAC_{it} / TA_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan :

$TAC_{it}$  : Total akrual perusahaan i pada periode

$DA_{it}$  : *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada periode t

$NDA_{it}$  : *Non discretionary accrual* perusahaan i pada periode t

$NI_{it}$  : *Net income* perusahaan i pada periode t

$CFO_{it}$  : *Cash flow operating* perusahaan i pada periode t

$TA_{it-1}$  : Total aktiva pada periode t-1

$\Delta REV_{it}$  : Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 untuk perusahaan i

$\Delta REC_{it}$  : perubahan piutang bersih perusahaan i pada tahun t

$PPE_{it}$  : Nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t

$\epsilon_{it}$  : Error term pada tahun t untuk perusahaan i

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  : Koefisien

Jika nilai *discretionary accrual* perusahaan negatif, berarti *earnings management* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara menurunkan laba, sebaliknya jika nilai *discretionary accrual* perusahaan positif, berarti *earnings management* yang dilakukan perusahaan yaitu dengan menaikkan laba perusahaan.

### 3.5.3 Kepemilikan institusional.

#### a. Definisi Konseptual

Menurut Sujoko (2007) dalam Amanda (2015), Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern.

#### b. Definisi Operasional

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana, 2009) dalam (Amanda, 2015). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

### 3.5.4 Dewan Komisaris Independen

#### a. Definisi Konseptual

Menurut Amril, dkk (2015), Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan langsung dengan manajemen, pemegang pengendali serta bebas dari hubungan bisnis perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang sama dengan komisaris yaitu menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas.



b. Definisi Operasional

Pada penelitian ini komisaris independen diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris perusahaan. dalam Amril, dkk (2015) dan Suryanto (2012).

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

### 3.5.5 Jumlah Anggota Komite Audit

a. Definisi Konseptual

Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012

menyatakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit salah satunya.”

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Pamungkas, 2014)

0 = Jika anggota Komite Audit berjumlah 3 orang

1 = Jika anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 3 orang

Data Komite Audit dapat dilihat dari laporan keuangan pada bagian catatan atas laporan keuangan ataupun *Annual Report*.

**Tabel 3.2**  
**Konseptual dan Dimensi Variabel**

Variabel	Konsep	Dimensi	Skala
----------	--------	---------	-------

Tindakan Pajak Agresif (Y)	Tindakan Pajak Agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong <i>tax evasion</i> . (Frank, <i>et. al.</i> , 2009)	$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre Tax Income}_{it}}$ (Amanda, 2015).	Rasio
Manajemen Laba (X)	Manajemen laba adalah intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. (Reysky, 2016).	$DA_{it} = (TAC_{it} / TA_{it-1}) - NDA_{it}$ (Reysky, 2016).	Rasio
Kepemilikan Institusional (Z.1)	Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. (Amanda, 2015).	$K.I = \frac{PSI}{JSD} \times 100\%$ PSI = Proporsi saham dimiliki institusi JSD = Jumlah saham yang Diterbitkan (Amanda, 2015).	Rasio
Dewan Komisaris Independen (Z.2)	Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan langsung dengan manajemen, pemegang pengendali serta bebas dari hubungan bisnis perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang sama dengan komisaris yaitu menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. (Amril, dkk, 2015)	$D.W.I = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$ (Amril, dkk, 2015).	Rasio

Jumlah Anggota Komite Audit (Z.3)	Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik ( <i>good corporate governance</i> ), perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit salah satunya. (Kep. Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012)	0 = Jika anggota Komite Audit berjumlah 3 Orang 1 = Jika anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 3 orang (Amanda, 2015).	Nominal
-----------------------------------	---	---	---------

### 3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh mekanisme Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating. Digunakan analisis regresi Dummy Variabel dan untuk mempermudah perhitungan maka penelitian ini akan menggunakan alat bantu yaitu *Partial Least Square* (PLS).

### 3.7 Statistik Deskriptif Data

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. (Siregar, 2010 : 2)

### 3.8 Uji *Partial Least Square*

Penelitian ini menggunakan satu variable endogen yaitu agresifitas pajak yang diprosikan dengan CETR. Variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu Manajemen Laba dan tiga variable moderasi yaitu komite audit, kepemilikan *institutional*, dan dewan

komisaris independen dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan error ( $\alpha$ ) sebesar 10%.

Analisa pada pengujian ini adalah:

1. *Analisa Inner Model*

Analisa ini diperlukan untuk memastikan bahwa model struktural yang ada akurat (Hussein, 2015:18).

Analisa outer model dilakukan dengan beberapa tahap:

- Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau disebut dengan  $R^2$  menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel eksogen dapat mempengaruhi variabel endogen. Jika hasil dari  $R^2$  semakin mendekati angka 1, hal ini dapat diartikan adanya hubungan yang kuat atau semakin tinggi  $R^2$  akan semakin baik kemampuan variabel eksogen dalam menerangkan variabel endogen (Gujarati, 2011:13). Untuk mendapatkan nilai  $R^2$  dapat dihitung dari hasil kuadrat dari koefisien korelasi.

Dalam penelitian ini, untuk menunjukkan koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan program WarpPLS dengan melihat tabel R dan  $R^2$ .

- *Predictive Relevance*

*Predictive Relevance* digunakan untuk mengetahui seberapa baik observasi yang dihasilkan oleh model dan estimasi struktural.

Terdapat dua pengukuran  $Q^2$  yaitu:

$Q^2 > 0$  : menunjukkan model struktur memiliki *predictive relevance*.

$Q^2 \leq 0$  : menunjukkan model struktur kurang memiliki *predictive relevance*.

Semakin  $Q^2$  mendekati satu dapat disimpulkan bahwa model struktural semakin baik.

- *Goodness of Fit Index*

Menggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari  $R^2$ . Model yang baik memiliki *Goodness of Fit Index* (GFI) sebesar  $> 0.90$

- Uji-t

Pengujian t dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Menurut Sugiyono (2012), uji-t statistik dilakukan pengujian hipotesis statistik.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang akan diuji merupakan suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol ( $\beta_i = 0$ ), artinya variabel independen bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) merupakan suatu parameter dimana variabel tidak sama dengan nol ( $\beta_i \neq 0$ ), artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Tahapan-tahapan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan hipotesis statistik

1.  $H_0$  : Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Tindakan Pajak Agresif.  
 $H_1$  : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Tindakan Pajak Agresif.
2.  $H_0$  : Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.  
 $H_1$  : Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.
3.  $H_0$  : Dewan Komisaris tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.  
 $H_1$  : Dewan Komisaris dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.
4.  $H_0$  : Komite Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

$H_1$  : Komite Audit dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

- b. Menentukan tingkat kesalahan (error)
- c. Menentukan kriteria penolakan hipotesis satu sampai dengan hipotesis tiga,

$H_0$  adalah jika:

1.  $P\text{-value} < \alpha 0,10$  maka  $H_0$  ditolak
2.  $P\text{-value} \geq \alpha 0,10$  maka  $H_0$  diterima

Atau jika menggunakan uji-t maka kriteria penolakan hipotesis berdasarkan hasil t-hitung, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menerima  $H_1$ , apabila  $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$  atau hipotesis diterima jika  $t$  signifikan  $< 0.10$
2. Menolak  $H_0$ , apabila  $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$  atau hipotesis ditolak jika  $t$  signifikan  $> 0.10$

- d. Menentukan kriteria penolakan hipotesis dua sampai dengan hipotesis empat,  $H_0$  adalah jika:

1.  $b_2 \neq 0$  dan  $b_{2-4} = 0$ , maka  $H_0$  kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit bukan merupakan moderator
2.  $b_2 \neq 0$  dan  $b_{2-4} \neq 0$ , maka  $H_0$  kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit bukan merupakan quasi moderator.
3.  $b_2 = 0$  dan  $b_{2-4} \neq 0$ , maka  $H_0$  kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit bukan merupakan *pure moderator*

Jenis-jenis Variabel Moderasi (Ghozali, 2013):

**Tabel 3.4 Jenis-Jenis Variabel Moderasi**

	Berhubungan dengan variabel endogen (Y) dan atau eksogen (X)	Tidak berhubungan dengan variabel endogen (Y) dan
--	--	---

		atau eksogen (X)
Tidak berinteraksi dengan variabel eksogen (X)	1 Intervening, exogen, anteseden, predictor	2 Moderator (Homologizer)
Berinteraksi dengan variabel eksogen (X)	3 Moderator (Quasi Moderator)	4 Moderator (Pure Moderator)

Kuatnya korelasi antara dependen dan independen tergantung dari besarnya error.

Semakin besar error, semakin kecil kekuatan korelasi dua variabel.

Dalam penelitian ini korelasi terdapat pada kuadran 4, variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel moderator tidak berhubungan dengan variabel endogen yaitu tindakan pajak agresif dan eksogen yaitu manajemen laba, tetapi berinteraksi dengan variabel eksogen atau secara matematis dapat dituliskan persamaan regresi:

$$\text{Pajak Agresif}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{EM}_{it} + \beta_2 \text{KI}_{it} + \beta_3 \text{DKI}_{it} + \beta_4 \text{KA}_{it} + \beta_5 (\text{EM}_{it} * \text{KI}_{it}) + \beta_6 (\text{EM}_{it} * \text{DKI}_{it}) + \beta_7 (\text{EM}_{it} * \text{KA}_{it}) + e$$

Dimana :

$\text{EM}_{it}$  = *Earnings Management* / Manajemen Laba

$\alpha$  = konstanta

$\text{KI}_{it}$  = Kepemilikan Institusional

$\text{DKI}_{it}$  = Dewan Komisaris Independen

$\text{KA}_{it}$  = Komite Audit

$\beta$  = koefisien regresi untuk masing–masing variabel independen

e = error





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan pengaruh manajemen laba (DA), terhadap tindakan pajak agresif (CETR) dengan komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di index JII periode 2012-2017.

Perusahaan-perusahaan dalam objek penelitian adalah perusahaan yang konsisten tidak mengalami kerugian dan terdaftar di JII dalam enam tahun berturut-turut. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 96 data sample.

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari masing-masing variabel dapat disajikan dalam tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
A.P	96	,005	,464	,23361	,095015
E.M	96	-,093	,375	,07327	,077994
K.A	96	,000	1,000	,34375	,477452
K.I	96	,181	,838	,57668	,135038
D.K.I	96	,286	,800	,39951	,095266
Valid N (listwise)	96				

Pada tabel statistik deskriptif diatas menjelaskan mengenai nilai minimum yang menunjukkan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 sampel. Selain itu tabel diatas juga menunjukkan:

### 1. Tindakan pajak agresif

Dari 96 responden ini variabel dependen yaitu tindakan pajak agresif memiliki nilai minimum sebesar 0,005 yang dimiliki oleh (BSDE) pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa tingkat nilai CETR masih sangat rendah dan mengindikasikan adanya tindakan pajak agresif yang cukup tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai maksimum sebesar 0,464 yang dimiliki oleh (PGAS) pada tahun 2017, hal ini menunjukkan tingkat CETR yang cukup tinggi sehingga berimplikasi pada pemasukkan Negara yang cukup tinggi melebihi batas tarif pajak badan sebesar 25%.

Nilai rata-rata menunjukkan nilai 0,233 dan nilai standar deviasi sebesar 0,95, nilai rata-rata sebesar 0,233 hal ini mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terindikasi melakukan tindakan pajak agresif.

### 2. Manajemen Laba

Dari 96 responden ini variabel independen yaitu Manajemen Laba memiliki nilai minimum sebesar -0,093 yang dimiliki (UNTR) pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 0,375 yang dimiliki oleh (SMRA) pada tahun 2015, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat intervensi manajemen dalam proses penentuan laba cukup tinggi biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi yang dilakukan oleh manajemen untuk memperoleh laba yang tinggi dalam perusahaan.

Nilai rata-rata menunjukkan nilai 0,073 dan nilai standar deviasi sebesar 0,07, nilai rata-rata sebesar 0,073 hal ini mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terindikasi melakukan manajemen laba yang diprosikan dengan menggunakan nilai DA (*Discretionary accrual*).

### 3. Komite Audit

Dari 96 responden ini variabel moderasi yaitu Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dikarenakan hanya memiliki satu sampai dengan tiga orang komite audit, dan memiliki nilai maksimum sebesar 1 yang dapat diartikan memiliki lebih dari tiga komite audit, komite audit terbanyak dimiliki oleh (TLKM) pada tahun 2016 dan 2017 yang memiliki enam orang komite audit, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Nilai rata-rata variabel ini menunjukkan nilai 0,34 dan nilai standar deviasi sebesar 0,477, nilai rata-rata sebesar 0,34 menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan yang tergabung dalam JII periode 2012 sampai dengan 2017 memiliki rata-rata tidak lebih dari tiga orang komite audit, hal ini dapat mengindikasikan pengawasan yang efektif dan efisien kurang maksimal sehingga cenderung tidak tercapainya *good corporate governance*.

#### 4. Kepemilikan Institusional

Dari 96 responden ini variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,181 yang dimiliki (LPKR) pada tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 0,838 yang dimiliki (PTBA) pada tahun 2012, hal ini mengindikasikan kualitas pengawasan pada tahun tersebut dari institusi lebih memadai sehingga manajemen sebagai agen dapat memaksimalkan laba pemilik.

Nilai rata-rata variabel ini menunjukkan nilai 0,57 dan nilai standar deviasi sebesar 0,135, nilai rata-rata sebesar 0,57 menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan yang tergabung dalam JII periode 2012 sampai dengan 2017 mengindikasikan pengawasan yang berasal dari kepemilikan institusional cukup memadai sehingga dapat manajemen sebagai agen dapat memaksimalkan laba pemilik.

#### 5. Dewan Komisaris Independen

Dari 96 responden ini variabel moderasi yaitu dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,286 yang dimiliki (SMGR) pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 0,800 yang dimiliki (LPKR) pada tahun 2017, hal ini mengindikasikan kualitas pengawasan dewan komisaris independen pada tahun tersebut lebih memadai sehingga manajemen sebagai agen dapat memaksimalkan laba pemilik.

Nilai rata-rata variabel ini menunjukkan nilai 0,399 dan nilai standar deviasi sebesar 0,095, nilai rata-rata sebesar 0,399 menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan yang tergabung dalam JII periode 2012 sampai dengan 2017 mengindikasikan pengawasan kurang efektif oleh dewan komisaris independen pada tahun tersebut, sehingga memungkinkan tidak adanya kontrol akan penambahan hutang, akibatnya potensi kebangkrutan semakin meningkat.

#### **4.2.1 Perkembangan Data *Discretionary accrual***

##### **4.2.1.1 Rata-rata *Discretionary accrual***

Pergerakan DA (*Discretionary accrual*) dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

**Tabel 4.2 Rata-Rata *Discretionary accrual* 2012-2017**

DA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	6 Th AVERAGE
AALI	0,068	0,003	0,185	0,109	0,079	0,008	0,075
ADRO	0,055	-0,008	0,024	0,002	0,015	0,092	0,030
AKRA	0,130	0,361	0,021	-0,010	0,077	0,062	0,107
ASII	0,100	0,103	0,157	0,035	0,082	0,051	0,088
BSDE	0,093	0,125	0,180	0,103	0,068	0,014	0,097
ICBP	-0,026	0,045	0,048	0,049	-0,002	-0,029	0,014
KLBF	0,054	0,146	0,098	0,055	0,061	0,063	0,080
LPKR	0,072	0,174	0,118	-0,010	0,050	0,126	0,088
LSIP	0,026	0,038	0,074	0,076	0,046	0,035	0,049
PGAS	0,000	0,100	0,180	0,057	0,022	-0,039	0,053
PTBA	0,090	0,039	0,135	0,110	0,093	0,147	0,102
SMGR	0,102	0,103	0,204	0,112	0,164	0,056	0,124
SMRA	-0,027	0,101	0,225	0,375	0,299	0,045	0,170
TLKM	0,016	0,092	-0,008	0,090	0,077	0,027	0,049
UNTR	0,047	-0,028	0,009	-0,092	-0,016	-0,042	-0,021
WIKA	-0,005	0,103	0,139	0,051	0,122	-0,010	0,067
<b>Total</b>	<b>0,795</b>	<b>1,496</b>	<b>1,788</b>	<b>1,111</b>	<b>1,238</b>	<b>0,606</b>	<b>1,172</b>

Sumber: data di olah (Lampiran)

Nilai tertinggi DA pada tahun 2015 sebesar 0,375 (SMRA). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat intervensi manajemen dalam proses penentuan laba cukup tinggi biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi yang dilakukan oleh manajemen untuk memperoleh laba yang tinggi dalam perusahaan.

#### 4.2.1.2 Rata-rata Jumlah Anggota Komite Audit

**Tabel 4.3 Rata-Rata Komite Audit 2012-2017**

K.A	2012	2013	2014	2015	2016	2017	6 Th Average
AALI	3	3	3	3	3	3	3
ADRO	3	3	3	3	3	3	3
AKRA	3	3	3	3	3	3	3
ASII	4	4	4	4	4	4	4
BSDE	3	3	3	3	3	3	3
ICBP	4	3	3	3	3	3	3,2
KLBF	3	3	3	3	3	3	3
LPKR	3	3	3	3	3	3	3
LSIP	3	3	3	3	3	3	3
PGAS	5	5	5	5	4	4	4,7
PTBA	3	4	3	4	3	3	3,3
SMGR	4	4	5	4	4	4	4,2
SMRA	3	3	3	3	3	3	3
TLKM	6	5	5	4	6	6	5,3
UNTR	3	3	3	3	3	3	3
WIKA	5	5	5	4	4	5	4,7
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56,3</b>

Sumber: data di olah 2018

Jumlah anggota komite audit terbanyak dimiliki oleh perusahaan Telkom (TLKM) yang mempunyai jumlah rata-rata anggota komite audit sebesar 5,3 dan memiliki 6 anggota komite audit pada dua tahun terakhir selama enam tahun yaitu tahun 2016 dan 2017. Secara keseluruhan jumlah anggota komite audit dalam rentan waktu enam tahun dari 2012-2017 pada perusahaan yang tergabung dalam JII, memiliki lebih dari 3 anggota komite audit, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

#### 4.2.1.3 Rata-rata Kepemilikan Institusional

**Tabel 4.4 Rata-Rata Kepemilikan Institusional 2012-2017**

K.I	2012	2013	2014	2015	2016	2017	6 Th Average
AALI	0,797	0,797	0,797	0,797	0,797	0,797	0,797
ADRO	0,439	0,439	0,439	0,439	0,439	0,439	0,439
AKRA	0,592	0,592	0,588	0,592	0,586	0,585	0,589
ASII	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501
BSDE	0,631	0,631	0,649	0,646	0,611	0,606	0,629
ICBP	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805
KLBF	0,566	0,567	0,567	0,567	0,565	0,568	0,567
LPKR	0,181	0,181	0,234	0,234	0,405	0,468	0,284
LSIP	0,595	0,595	0,595	0,596	0,596	0,596	0,596
PGAS	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570
PTBA	0,838	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,681
SMGR	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
SMRA	0,418	0,376	0,376	0,376	0,376	0,457	0,397
TLKM	0,654	0,635	0,622	0,609	0,592	0,582	0,616
UNTR	0,595	0,596	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595
WIKA	0,655	0,652	0,652	0,651	0,651	0,651	0,652
<b>Total</b>	<b>9,348</b>	<b>9,097</b>	<b>9,150</b>	<b>9,138</b>	<b>9,249</b>	<b>9,380</b>	<b>9,227</b>

Sumber: data di olah 2018

Nilai tertinggi kepemilikan institusi di perusahaan yang tergabung dalam JII adalah sebesar 0,838 yang dimiliki oleh perusahaan PTBA (Tambang Batu Bara PT Tbk ), pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan kualitas pengawasan pada tahun tersebut dari institusi lebih memadai sehingga manajemen sebagai agen dapat memaksimalkan laba pemilik.

Nilai terendah kepemilikan institusi di perusahaan yang tergabung dalam JII adalah sebesar 0,181 yang dimiliki oleh perusahaan LPKR (Lippo Karawaci Tbk PT), pada tahun 2012. Tingkat kepemilikan yang rendah mengindikasikan bahwa pengawasan kurang efektif pada tahun tersebut, sehingga memungkinkan tidak adanya kontrol akan penambahan hutang, akibatnya potensi kebangkrutan semakin meningkat.

#### 4.2.1.4 Rata-rata Dewan Komisaris Independen



**Tabel 4.5 Rata-Rata Dewan Komisaris Independen 2012-2017**

D.K.I	2012	2013	2014	2015	2016	2017	6 Th Average
AALI	0,429	0,429	0,429	0,400	0,400	0,400	0,414
ADRO	0,333	0,333	0,333	0,400	0,400	0,400	0,367
AKRA	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
ASII	0,417	0,300	0,364	0,364	0,333	0,333	0,352
BSDE	0,375	0,375	0,375	0,400	0,400	0,400	0,388
ICBP	0,375	0,429	0,429	0,500	0,500	0,500	0,455
KLBF	0,333	0,333	0,333	0,429	0,429	0,429	0,381
LPKR	0,714	0,750	0,556	0,500	0,667	0,800	0,664
LSIP	0,444	0,375	0,375	0,333	0,333	0,333	0,366
PGAS	0,400	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,344
PTBA	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
SMGR	0,500	0,333	0,429	0,286	0,286	0,286	0,353
SMRA	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
TLKM	0,400	0,333	0,429	0,429	0,429	0,500	0,420
UNTR	0,500	0,429	0,429	0,333	0,333	0,333	0,393
WIKA	0,400	0,333	0,333	0,286	0,286	0,333	0,329
<b>Total</b>	<b>6,787</b>	<b>6,252</b>	<b>6,312</b>	<b>6,159</b>	<b>6,295</b>	<b>6,548</b>	<b>6,392</b>

Sumber: data di olah 2018

Nilai tertinggi dewan komisaris independen di perusahaan yang tergabung dalam JII adalah sebesar 0,800 yang dimiliki oleh perusahaan LPKR (Lippo Karawaci Tbk PT), pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan kualitas pengawasan dewan komisaris independen pada tahun tersebut lebih memadai sehingga manajemen sebagai agen dapat memaksimalkan laba pemilik.

Nilai terendah dewan komisaris independen di perusahaan yang tergabung dalam JII adalah sebesar 0,286 yang dimiliki oleh perusahaan SMGR (Semen Indonesia Tbk PT), pada tahun 2015. Tingkat kualitas pengawasan dewan komisaris independen yang rendah mengindikasikan bahwa pengawasan kurang efektif pada tahun tersebut, sehingga memungkinkan tidak adanya kontrol akan penambahan hutang, akibatnya potensi kebangkrutan semakin meningkat.

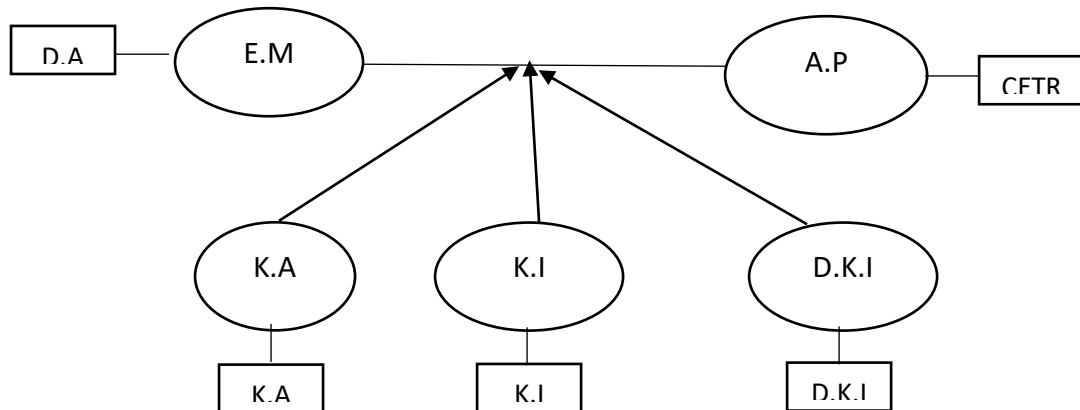
## 4.1 Hasil Pengujian

Penelitian ini dibantu dengan menggunakan bantuan software Warp-PLS 6.0 dikarenakan data tidak berdistribusi secara normal dan hasil pengujian dijelaskan sebagai berikut:

### 4.3.1 Konseptualisasi Model dan Variabel Konstruk Penelitian

Pada tahap ini Peneliti melakukan mendeskripsikan secara konseptual model yang diteliti. Indikator penelitian Manajemen Laba yang berbentuk reflektif dihubungkan terhadap Tindakan Pajak Agresif yang dibangun secara langsung maupun melalui pemoderasi variabel Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen. Hubungan tersebut membangun suatu model penelitian berdasarkan konsep teori yang ada. Konseptual model digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Path Analysis Model



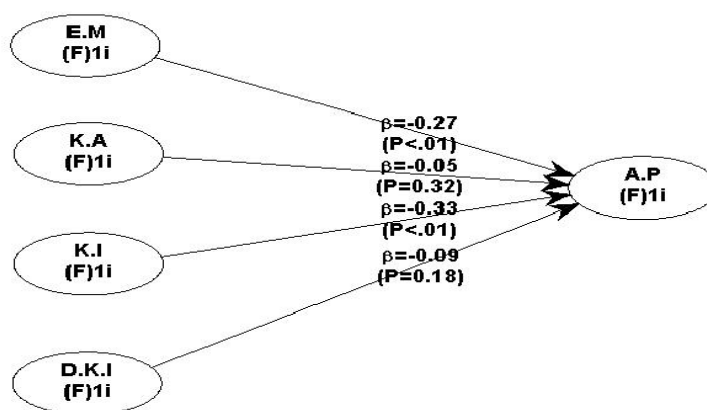
#### A. Pengujian Inner Model

Uji *inner model* digunakan untuk membuktikan hubungan hipotesis satu (H1) sampai dengan Hipotesis empat (H4) yaitu: manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif. Dan pengujian ini dilakukan karena indikator pengukuran dari masing-masing variabel tidak lebih dari satu indikator.

### 4.3.2 Pengujian Pengaruh Langsung Variabel Moderasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen, berinteraksi dengan variabel eksogen yaitu manajemen laba sebagai variabel *quasi moderator* atau berinteraksi dengan variabel eksogen yaitu manajemen laba sebagai variabel *pure moderator*.

Gambar 4.2 Model Struktur Path



Sumber : Data diolah (WarpPLS)

Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Penelitian

Path	R <sup>2</sup>	Moderating Effect		
		B	P-Value	Kesimpulan
Moderasi K.A	-0,27	-0,05	0,32	Homologiser Moderasi
Moderasi K.I		-0,033	0,03	Parsial Moderasi
Moderasi D.K.I		-0,09	0,18	Homologiser Moderasi

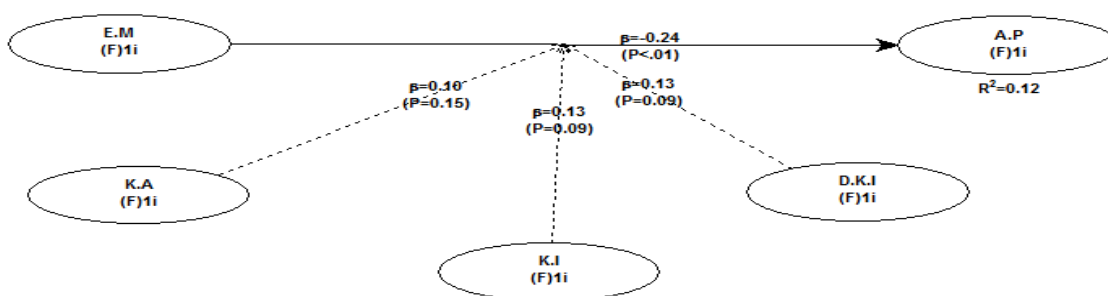
Pada tabel 4.6 variabel moderasi komite audit bernilai P-Value 0,32 > 0,10 dan dewan komisaris independen bernilai P-Value 0,18 > 0,10, maka kedua variabel tersebut termasuk homologiser moderasi, sedangkan variabel moderasi kepemilikan institusional bernilai P-Value 0,03 < 0,10, maka variabel ini dapat mempengaruhi

variabel endogen secara langsung, atas dasar ini peneliti menyatakan variabel tersebut termasuk pure moderasi.

### 4.3.3 Pengujian Full Model dengan Moderasi

Sebelum menjawab hipotesis penelitian, maka dilakukan pengujian model antara perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif dan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif. Hasil pengujian dampak dari perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif dan perusahaan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif dilakukan dengan menggunakan aplikasi statistic WarpPLS 6.0 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2 Model Struktur Path



Sumber : Data diolah (WarpPLS)

Struktural model dilakukan dengan melihat  $R^2$ , nilai  $\beta$  dan p jalur. Hasil pengujian dapat dilihat dari Gambar 4.2, dan full model moderasi dalam tabel ini:

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi

Path	$R^2$	Direct Effect		
		B	P-Value	Kesimpulan
E.M - A.P	0,12	-0,24	0,007	Signifikan
Path		Moderating Effect		
E.M - K.A		0,104	0,148	Tidak Signifikan
E.M - K.I		0,131	0,093	<i>Partial Moderating</i>
E.M - D.K.I		0,133	0,091	<i>Full Moderating</i>

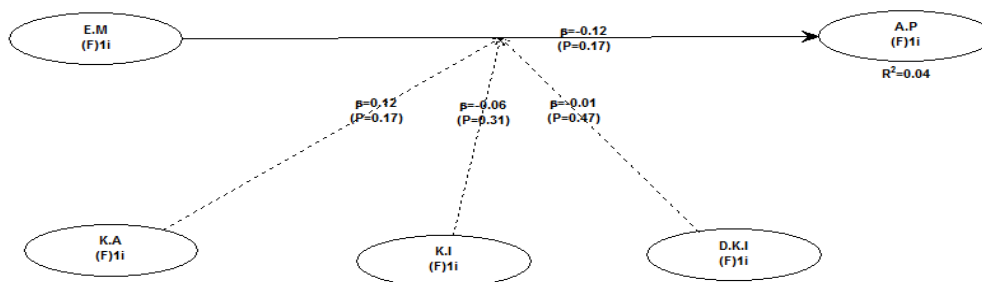
Sumber : Data diolah (WarpPLS)

Dalam tabel 4.7 menerangkan bahwa Koefisien determinasi atau disebut dengan  $R^2$  menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel eksogen dapat mempengaruhi variabel endogen. Jika hasil dari  $R^2$  semakin mendekati angka 1, hal ini dapat diartikan adanya hubungan yang kuat atau semakin tinggi  $R^2$  akan semakin baik kemampuan variabel eksogen dalam menerangkan variabel endogen (Gujarati, 2011:13).

Untuk mendapatkan nilai  $R^2$  dapat dihitung dari hasil kuadrat dari koefisien korelasi. Dalam penelitian ini, untuk menunjukkan koefisien korelasi dan koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel Manajemen Laba dapat mempengaruhi variabel Tindakan Pajak Agresif sebesar 0,12 atau 12%, dan memiliki tingkat signifikansi P-Value sebesar  $0,007 < 0,05$ , dengan demikian variabel manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Pengujian model terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan pajak agresif dan memiliki nilai CETR  $< 25\%$  adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 Model Struktur Path



Sumber : Data diolah (WarpPLS)

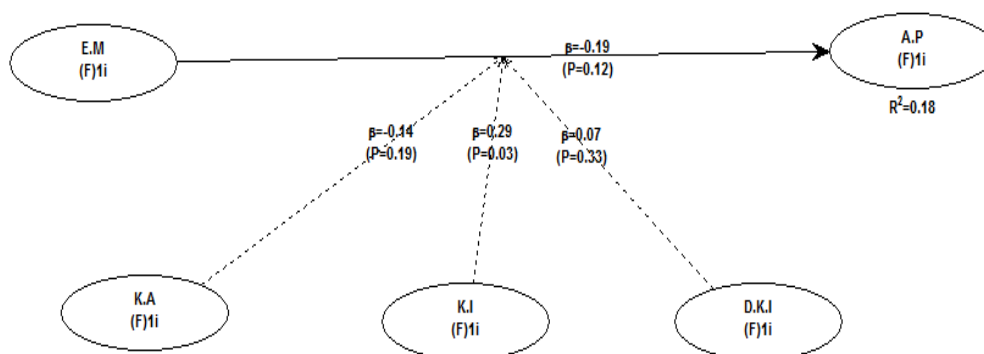
**Tabel 4.8 Koefisien Determinasi Kelompok 1**

Path	R <sup>2</sup>	Direct Effect		
		B	P-Value	Kesimpulan
E.M - A.P	0,04	-0,12	0,17	Tidak Signifikan
Path		Moderating Effect		
B		P-Value	Kesimpulan	
E.M - K.A		0,12	0,17	Tidak Signifikan
E.M - K.I		0,06	0,31	Tidak Signifikan
E.M - D.K.I	0,01	0,47	Tidak Signifikan	

Sumber : Data diolah (WarpPLS)

Pengujian model terhadap perusahaan yang tidak terindikasi melakukan tindakan pajak agresif atau yang memiliki nilai CETR  $\geq 25\%$  adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Model Struktur Path



Sumber : Data diolah (WarpPLS)

**Tabel 4.4 Koefisien Determinasi Kelompok 2**

Path	R <sup>2</sup>	Direct Effect		
		B	P-Value	Kesimpulan
E.M - A.P	0,18	-0,19	0,12	Tidak Signifikan
Path		Moderating Effect		
B		P-Value	Kesimpulan	
E.M - K.A		0,14	0,19	Tidak Signifikan
E.M - K.I		0,29	0,03	Signifikan
E.M - D.K.I	0,07	0,33	Tidak Signifikan	

**Tabel 4.9 Koefisien Determinasi**

Variabel	Gabungan		Kelompok I		Kelompok II	
	Beta	p value	Beta	p value	Beta	p value
<b>Direct Effect</b>						
E.M - A.P	-0,24	0,007	-0,12	0,17	-0,19	0,12
<b>Moderating Effect</b>						
Moderasi K.A	0,104	0,148	0,12	0,17	0,14	0,19
Moderasi K.I	0,131	0,093	0,06	0,31	0,29	0,03
Moderasi D.K.I	0,133	0,091	0,01	0,47	0,07	0,33
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>N=96</b>		<b>N=61</b>		<b>N=35</b>	
	12%		18%		4%	

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS

Berdasarkan hasil yang didapatkan diketahui bahwa variabel *earning management* terhadap tindakan pajak agresif. Gabungan antara perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan pajak agresif dengan perusahaan yang tidak terindikasi melakukan tindakan pajak agresif mempunyai nilai Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 12% dan memiliki nilai P-Value sebesar 0,007.

Pada kelompok I yaitu perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan pajak agresif, memiliki nilai Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 18% dan memiliki nilai P-Value sebesar 0,17 dan pada kelompok II yaitu perusahaan yang tidak terindikasi melakukan tindakan pajak agresif, memiliki nilai Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 4% dan memiliki nilai P-Value sebesar 0,12.

Penelitian ini dilakukan dengan uji beda, hal ini dilakukan dengan memperhitungkan tarif pajak badan sebesar 25%. Dalam sampel ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok I yang mengacu pada gambar 4.2 dengan nilai CETR < 25% dan gambar 4.3 dengan nilai CETR  $\geq$  25% yang mengacu pada kelompok II.

#### 4.3.4 Pengujian Man Whitney U Test

Uji Mann Whitney atau uji dua sampel yang tidak berpasangan merupakan salah satu bagian dari statistik non parametrik. Uji mann whitney menjadi salah satu alternative dikarenakan data tidak berdistribusi dengan normal dalam uji independen sampel T test. Seperti halnya uji T test, uji mann whitney dilakukan untuk mengetahui perbedaan dua sampel pada penelitian ini yaitu antara perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif dan perusahaan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif, yang di tandai oleh nilai CETR > 25% untuk perusahaan yang terindikasi melakukan agresifitas pajak dan bernilai CETR <25% untuk perusahaan yang tidak terindikasi melakukan agresifitas pajak.

**Tabel 4.10 Uji Mann-Whitney**

	A.P	N	Mean Rank	Sum of Ranks
E.M	Kurang dari 25%	61	52,61	3209,00
	Lebih dari 25%	35	41,34	1447,00
	Total	96		
K.A	Kurang dari 25%	61	51,17	3121,50
	Lebih dari 25%	35	43,84	1534,50
	Total	96		
K.I	Kurang dari 25%	61	43,39	2646,50
	Lebih dari 25%	35	57,41	2009,50
	Total	96		
D.K.I	Kurang dari 25%	61	47,31	2886,00
	Lebih dari 25%	35	50,57	1770,00
	Total	96		

Sumber: Data diolah SPSS 2018

Variabel E.M (*Earning Management*) atau manajemen laba memiliki nilai *mean rank* sebesar 52,61 untuk perusahaan yang bernilai CETR > 25%, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai *mean rank* sebesar 41,34 untuk perusahaan yang memiliki nilai CETR < 25%, artinya adalah perusahaan yang memiliki tingkat manajemen laba yang tinggi terindikasi melakukan



tindakan pajak agresif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat manajemen laba yang rendah.

**Tabel 4.11 Uji Mann Whitney**

	E.M	K.A	K.I	D.K.I
Mann-Whitney U	817,000	904,500	755,500	995,000
Wilcoxon W	1447,000	1534,500	2646,500	2886,000
Z	-1,907	-1,498	-2,377	-,569
Asymp. Sig. (2-tailed)	,057	,134	,017	,569

Sumber : Data diolah SPSS 2018

Manajemen laba diprosikan dengan nilai asymp Sig.  $0,057 > 0,10$ , yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

#### 4.3.5 Pengujian Hipotesis.

1. Uji  $H_1$  (Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif )

a. Hipotesis Statistik

$H_0$  : manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif

$H_1$  : manajemen laba berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif

b. Kriteria Pengujian

Jika  $p < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima

c. Hasil Pengujian

Koefisien  $-0.24$  mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat manajemen laba akan semakin menurunkan nilai CETR yang membuktikan bahwa semakin rendah nilai CETR maka semakin terindikasi tindakan pajak agresif dan memiliki nilai *mean rank* sebesar 52,61 untuk perusahaan yang bernilai  $CETR > 25\%$ , dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai *mean rank* sebesar 41,34 untuk perusahaan yang memiliki nilai  $CETR < 25\%$ , dengan  $P$ -

*value*  $0.007 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa menolak  $H_0$  dan tidak cukup bukti untuk menolak  $H_1$ . Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Nilai *mean rank* yang tinggi mengindikasikan bahwa kenaikan manajemen laba berpengaruh terhadap adanya tindakan pajak agresif.

2. Uji  $H_2$  (Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderating)

a. Hipotesis Statistik

$H_0$  : Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

$H_1$  : Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

b. Kriteria Pengujian

Jika  $p < 0.10$  maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima

c. Hasil Pengujian

Koefisien 0.131 dengan *P-value*  $0.093 < 0.10$  maka dapat disimpulkan bahwa menolak  $H_0$  dan tidak cukup bukti untuk menolak  $H_1$  dan mengacu pada tabel 4.1 kepemilikan institusional menjadi *quasi moderator*. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh signifikan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Koefisien positif mengindikasikan bahwa kenaikan kepemilikan institusional mampu menekan manajemen laba sehingga terjadinya penurunan terhadap tindakan pajak agresif.

3. Uji  $H_3$  (Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderating)

a. Hipotesis Statistik

$H_0$  : Dewan Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

$H_1$  : Dewan Komisaris Independen dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

b. Kriteria Pengujian

Jika  $p < 0.10$  maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima

c. Hasil Pengujian

Koefisien 0.133 dengan *P-value* 0.091 < 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa menolak  $H_0$  dan tidak cukup bukti untuk menolak  $H_1$ . Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh signifikan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Koefisien positif mengindikasikan bahwa banyaknya dewan komisaris independen mampu menekan manajemen laba sehingga terjadinya penurunan terhadap tindakan pajak agresif.

4. Uji H<sub>4</sub> (Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan komite audit sebagai variabel moderating)

a. Hipotesis Statistik

H<sub>0</sub> : Komite Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

H<sub>1</sub> : Komite Audit dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif.

b. Kriteria Pengujian

Jika  $p < 0.10$  maka H<sub>0</sub> ditolak, dan H<sub>1</sub> diterima

c. Hasil Pengujian

Koefisien 0.104 dengan *P-value* 0.148 > 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H<sub>1</sub> dan tidak cukup bukti untuk menolak H<sub>0</sub>. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dewan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh signifikan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Koefisien positif mengindikasikan bahwa banyaknya komite audit mampu meningkatkan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif namun tidak signifikan.

#### 4.3.6 Nilai R-Square

Nilai R<sup>2</sup> mengindikasikan seberapa besar pengaruh variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen. Pada penelitian ini didapat R<sup>2</sup> sebesar 0.12, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen manajemen laba dengan moderasi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit bisa menjelaskan sebesar 12% variabel endogen tindakan pajak agresif.

### **4.3.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.7.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel manajemen laba terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Nilai *mean rank* kelompok perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif yang lebih besar dari nilai *mean rank* kelompok perusahaan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif, menunjukkan bahwa semakin tinggi manajemen laba terbukti melakukan tindakan pajak agresif, hal ini dapat dilihat ditabel 4.2 dan 4.7 uji mann whitney. Dikarenakan manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi dalam perlakuan akuntansi, terindikasi salah satu opsi yang dipilih adalah melakukan tindakan pajak agresif. Fleksibilitas ini dimanfaatkan pihak *agensi* untuk mengelola laba. Hal ini dapat dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengurangi keandalan laporan keuangan dan berpotensi tidak mencerminkan kondisi pendapatan yang sebenarnya.

Arief (2016) mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba sebagai variabel independen mempunyai pengaruh signifikan pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan terindikasi meningkatkan laba dengan menetapkan tarif dibawah ketentuan yang berlaku dengan tujuan mendapatkan laba lebih besar atau menghindari kerugian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2014), Tiaras dan Henryanto (2015), Sari (2016), dan Tang (2011), yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Amril, dkk (2015), Putri (2014), Winarsih (2011) dan Cahyani (2016) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh tidak signifikan terhadap pajak agresif.

#### **4.3.7.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderating.**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan kepemilikan institusi sebagai moderating terbukti signifikan terhadap tindakan pajak agresif, yang dibuktikan pada tabel 4.2. Mengacu pada tabel 4.1 tipe moderasi yang dimiliki variabel kepemilikan institusional adalah *quasi moderating* yang artinya adalah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif sekaligus mampu menjadi variabel eksogen terhadap variabel tindakan pajak agresif sebagai variabel endogen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2015) dan Amril, dkk (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Dikarenakan kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan, keberadaan mereka dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini diduga terjadi karena dengan memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang besar, investor institusional memiliki insentif yang kuat dalam memastikan bahwa keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Supriyanto (2012) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

#### **4.3.7.3 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderating.**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan dewan komisaris independen sebagai moderating terbukti signifikan terhadap tindakan pajak agresif, yang dibuktikan pada tabel 4.1. Tipe moderasi yang dimiliki variabel dewan komisaris independen adalah *pure moderating* yang artinya adalah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2012), Winarsih, dkk (2011), Amril, dkk (2015) dan Fahriani (2016) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Dikarenakan dewan komisaris memiliki arti penting dalam perusahaan, keberadaan mereka dianggap mampu memonitoring atas pelaporan keuangan menjadi mekanisme monitoring yang efektif dan efisien dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Hal ini diduga terjadi karena dengan adanya dewan komisaris independen dalam jumlah yang besar, investor memiliki rasa keadilan yang kuat dalam memastikan bahwa keputusan

yang akan diambil oleh pihak manajemen akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soeprianto (2012) dan Tiaras dan Heryanto (2015) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

#### **4.3.7.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Komite Audit sebagai variabel moderating.**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan dewan komisaris independen sebagai moderating terbukti tidak signifikan terhadap tindakan pajak agresif, yang dibuktikan pada tabel 4.1. Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahriani (2016), Pamungkas (2014), dan Winnarsih, dkk (2011) yang mengatakan bahwa komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Dikarenakan kompensasi serta insentif yang diterima oleh komite audit berakibat penghematan pajak serta *rent extraction* menjadi pemicu komite audit membantu manajer dalam melakukan tindakan pajak agresif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan selalu berusaha mencari cara dalam mengurangi beban pajak perusahaan.

Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2015), Pamungkas (2014) dan Sabrina dan Soeprianto (2012) mengatakan bahwa komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.



## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai hubungan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderating. Alat analisis yang digunakan WarpPLS 6.0. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2017, manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi dalam perlakuan akuntansi, terindikasi salah satu opsi yang dipilih adalah melakukan tindakan pajak agresif. Fleksibilitas ini dimanfaatkan pihak *agensi* untuk mengelola laba. Hal ini dapat dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengurangi keandalan laporan keuangan dan berpotensi tidak mencerminkan kondisi pendapatan yang sebenarnya.
2. Hal yang serupa juga terjadi pada kepemilikan institusional yang dapat memoderasi manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2017, bahkan variabel kepemilikan institusional dapat menjadi variabel *predictor* terhadap tindakan pajak agresif, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

3. Dewan komisaris independen menjadi *pure moderating*, sehingga dapat memoderasi manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2017, Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya mencakup enam tahun periode penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
2. Variabel bebas yang diteliti hanya menggunakan manajemen laba dengan nilai DA (*Discretionary accrual*) sebagai indikator. Komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderating. Masih banyak Masih banyak variabel bebas lainnya yang dapat diuji.
3. Pada umumnya penelitian terdahulu memilih sampel pada perusahaan manufaktur, penelitian ini memilih sampel perusahaan yang tergabung di JII untuk menjadi pembeda penelitian sebelumnya dan karena alasan kepraktisan.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan yang konsisten selama enam tahun berturut-turut terdaftar pada JII (*Jakarta Islamic Index*).

### **5.3 Saran Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

#### **5.3.1 Bagi Akademisi**

- a. Mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tindakan pajak agresif.
- b. Memperluas sample perusahaan tidak hanya perusahaan yang masuk kedalam JII (*Jakarta Islamic Index*).
- c. Memperluas tahun penelitian lebih dari enam tahun.

#### **5.3.2 Bagi Praktisi**

Investor diharapkan mendapatkan keyakinan serta informasi untuk perusahaan agar dapat mengontrol tindakan pajak agresif dan melihat seberapa besar tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang.  
Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Scott, W.R. 2000. *Financial Accounting Theory. International Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Tunggal, Amin Widjaja. 2014. *Internal Audit, Enterprise Risk Management dan Corporate Governance*. Jakarta :Harvarindo

Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2000. *"Perpajakan Indonesia"*. Cetakan Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Warsono, Sony dkk. 2010. *CGCG UGM's Corporate Governance Rating Model*. Yogyakarta :GCGC UGM.

### JURNAL :

Amanda, Okky Wahyu (2015). "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif". Universitas Islam 45: Bekasi. Hal 40-52

Amril, Alfred, Dwi, dan Pop. (2015). "Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Penelitian Universitas Bung Hatta*. Jakarta. Hal 5-13.

Arief, Reysky Aisyah. 2016 "Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak". *e-Proceeding of Management : Vol.3*. Hal 66-73.

- Cahyani, Risma. (2016). “Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal Penelitian Universitas Syarif Hidayatullah* : Jakarta. Hal 56-82.
- Dechow, P. & Dichev, I. (2002). “The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Error”. *The Accounting Review*, 77, 35–59.
- Fahriani, Melinda. (2016) “Pengaruh good corporate governance terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan maufaktur.” *Jurnal Ilmu Riset dan Riset Akuntansi* : Volume 5 nomor 7. Hal 18-19.
- Fama, E.F. & Jensen, M.C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26: 301–325.
- Frank M, Lynch L, dan Rego S. (2009). “ Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting”. *The Accounting Review*. Hal 467-496.
- Kamila, Putri Almainda dan Dwi Martani. (2014). “Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak”. *Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok. Hal 17-18.
- Lietz, Gernit 2013. “Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework”. *Working Paper University of Munster*. Hal 5-10.
- Meilinda, Maria. (2013). “Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak”. Universitas Diponegoro : Semarang. Hal 39-43.
- Pamungkas, Agus Catur. (2014). “Pengaruh Komite Audit, Penerapan Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor terhadap tindakan Pajak Agresivitas”. *Jurnal Penelitian Universitas Pembangunan Nasional* : Jakarta. Hal 77-85.
- Putri, Lucy Y.P. (2014). “Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* Vol.2 No.1. Hal 12-15.

- Sabrina, Anita dan Gatot Soepriyanto (2013). "Analisis Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif". *Jurnal Penelitian Universitas Bina Nusantara* : Jakarta. Hal 8-9.
- Sari, Nadya Winda (2016). "*The Influence Of Earning Management To Tax Aggressiveness.*" *e-Proceeding of Management : Vol.3*. Hal 1530-1534.
- Suryanto, Krisnata Dwi dan Supramono. (2012). "Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Hal. 167-177.
- Suyono, Eko. (2017). "Berbagai Pengukuran Earning Management: Mana yang Paling Akurat". *Sustainable Competitive Advantage -7. FEB UNSOED*. Hal 308-312.
- Tang, Tanya. (2011). "Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management ? Empirical Evidence From China". *The International Journal Of Accounting*. Volume 46. Hal 22-23.
- Tiaras, Irvan dan Wijaya, Henryanto. (2015). "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi* Volume XIX. Hal 387-394.
- Winarsih, Rina, dkk. (2014). "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif". *Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok. Hal 1-21.

